

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensipnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya. Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih langsung baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan didaerah. Dari dua pertimbangan di atas, selanjutya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan didaerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. sehingga, pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Stándar Pelayanan Minimal untuk beberapa bidang program pelayanan dasar kepada masyarakat baik tingkat pusat maupun di daerah.

Berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional melalui surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah, sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan yang terdiri dari 9 (sembilan) SPM diterapkan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan 15 (lima belas) SPM di terapkan pada pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Adapun SPM yang diterapkan pada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Peraturan Mengari No.62 tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Perturan Menteri Sosial Nomor. 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741/MENKES/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten /Kota.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Kepala. BKKBN No, 55/HK-010/B5/2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Permenakertrans No.PER.15/MEN/X/2012 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- j. Peraturan menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- k. Peraturan Menteri Pertanian No.65/PERMENTAN/OT.10/12/2010 tentang SPM bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten /Kota.
- l. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.106/HK.510/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian (Proinsi . Kab/Kota.).
- m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM Bidang . Komunikasi dan Informatika di kabupaten/kota.
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Pananaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - 1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
  - 2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
  - 3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
  - 4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
  - 5. Bersifat dinamis
  - 6. Ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

#### I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor, 100/757/OTDA, tanggal 8 Juli 2002 dengan maksud untuk memberikan Konsep Dasar penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah dan penggunaan Standar Pelayanan Minimal agar masing-masing Institusi Pemerintah memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak lanjut dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor, 100/757/OTDA, tanggal 8 Juli 2002 adalah sebagai berikut :

- a. Menyamakan persepsi dan pemahaman Departemen / LPND terkait dalam menetapkan kewenangan wajib baik untuk bidang-bidang pemerintahan yang

wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana ditetapkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, maupun kewenangan di bidang-bidang Pemerintahan yang lain dan Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

- b. Memudahkan Departemen / LPND terkait dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Kewenangan Wajib Daerah;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki persepsi dan pemahaman yang sama pada saat penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerahnya dengan mengacu sesuai Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan oleh Departemen / LPND terkait;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki persepsi dan pemahaman yang sama pada saat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerahnya.

Tujuan dari penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman yang holistik/menyeluruh dan terpadu dalam penerapan dan pencapaian SPM.
2. Menyamakan pemahaman tentang definisi operasional indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, dan target nasional.
3. Membangun komitmen dan tindak lanjut untuk penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.
5. Membangun dasar dalam penentuan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan

### I.3. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Pelaporan SPM pada dokumen ini disusun dalam bentuk :

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari ;  
Pada Bab ini dibahas terkait dengan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika pelaporan dari penyusunan Standar Pelayanan Minimal tersebut.
2. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat  
Pada Bab ini diuraikan dengan jelas terkait dengan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Lombok Barat, Kebijakan strategis Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang.

3. Bab III Penerapan dan Pencapaian SPM

Pada Bab ini dibahas tentang bagaimana realisasi capaian kinerja dari masing-masing bidang SPM, dimana capaian kinerja yang menjadi tolok ukurnya adalah hasil dari capaian tahun sebelumnya.

4. Bab IV Permasalahan dan Solusi

Pada Bab ini dijelaskan tentang permasalahan apa saja yang dihadapi atau yang menjadi kendala proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh SKPD pengampu masing-masing bidang tersebut, serta solusi apa saja yang dijalankan agar penerapan dan pencapaian SPM kedepannya lebih baik lagi, sehingga ketika rencana jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan pada SKPD tersebut, bisa di tunjang dengan acuan dari jumlah anggaran pada penerapan SPM yang laksanakannya.

5. Penutup

Pada Bab ini dijelaskan terkait dengan kesimpulan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lombok Barat.



Tabel 2.1  
Luas Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
		(Km2)	(%)
1	2	3	4
1	Sekotong	529,38	50,23
2	Lembar	62,66	5,95
3	Gerung	62,30	5,91
4	Labuapi	28,33	2,69
5	Kediri	21,64	2,05
6	Kuripan	21,56	2,05
7	Narmada	107,62	10,21
8	Lingsar	96,58	9,16
9	Gunungsari	89,74	8,51
10	Batulayar	34,11	3,24
Jumlah / Total		1.053,92	100,00

Sumber : Lombok Barat dalam Angka tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Sekotong dengan luas wilayah 529,38 Km<sup>2</sup> (50,23 % Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat), sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan luas wilayah 21,56 Km<sup>2</sup> (2,05 % Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat).

Tabel 2.2  
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin  
di Kabupaten Lombok Barat.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Kelamin
1	2	3	4	5	4
1	Sekotong	28.312	28.496	56.808	99,35
2	Lembar	22.007	22.927	44.934	95,99
3	Gerung	35.665	39.555	75.22	90,17
4	Labuapi	29.965	31.497	61.462	95,14
5	Kediri	26.767	28.004	54.771	95,58
6	Kuripan	16.955	17.445	34.4	97,19
7	Narmada	43.313	45.619	88.932	94,95
8	Lingsar	31.376	32.779	64.155	95,72
9	Gunungsari	39.374	40.101	79.475	98,19
10	Batulayar	22.946	22.941	45.887	100,02
Jumlah / Total		296.68	309.364	606.044	95,90

Sumber : BPS, Lombok Barat dalam Angka tahun 2013

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat  
Menurut Jenis kelamin Tahun 2009-2013

Penduduk	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
Laki-laki	299,255	293,528	296,680	300,364	303,210
Perempuan	312,449	306,458	309,364	312,797	317,202
Jumlah	611,704	599,986	606,044	613,161	620,412

Sumber : BPS Lombok Barat

## 2.2 .Perekonomian

Seiring dengan pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 yang diperkirakan sebesar 1,17 persen, peningkatan PDRB per kapita tersebut cukup membawa arti bagi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan'00 yang mencapai 1,39 persen, dimana berdampak pada pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan'00 yang meningkat meskipun peningkatannya tidak sebesar 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 PDRB per kapita Kabupaten Lombok Barat atas dasar harga berlaku diproyeksikan masing – masing sebesar 8.726.313 rupiah dan 9.767.194 rupiah serta PDRB atas dasar harga konstan'00 sebesar 3.328.262 rupiah dan 3.461.797 rupiah.

Tabel 2.4  
PDRB Per Kapita Kabupaten Lombok Barat  
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000  
Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	2	3	4	5	6
<b>ADHB</b>					
1. PDRB per Kapita	6.585.272	7.386.388	8.152.878	8.945.071	9.769.194
2. Indeks Perkembangan (2000 = 100)	286,05	320,84	354,14	388,55	420,31
3. Laju pertumbuhan (%)	13,02	12,17	10,38	9,72	10,43
<b>ADHK</b>					
1. PDRB per Kapita	2.951.375	3.095.447	3.213.618	3.338.051	3.641.797
2. Indeks Perkembangan (2000 = 100)	128,2	134,46	139,59	145,00	150,37
3. Laju pertumbuhan (%)	6,82	4,88	3,82	3,87	4,01

Sumber : BPS Kab. Lombok Barat, \*) Angka sementara

2.3. Pendidikan

Capaian penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), menurunnya Angka Putus Sekolah (DO), meningkatnya Rata – rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf.

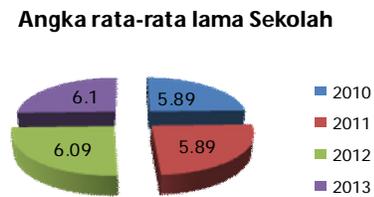
a. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Selama kurun waktu 2010-2013, angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2010 mencapai 5,89 tahun meningkat di tahun 2012 menjadi 6,09 tahun dan meningkat 0,01 diigit di Tahun 2013 menjadi 6,10 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah untuk tiga tahun terakhir Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1  
Angka rata-rata lama sekolah

No.	Tahun Pelaksanaan	Capaian
1	2010	5,89
2	2011	5,89
3	2012	6,09
4	2013	6,10



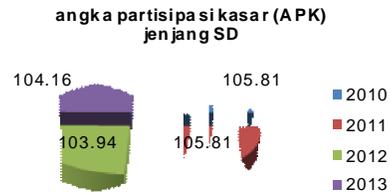
b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk jenjang SD/MI, pada tahun 2010 berada di angka 105,81% terus mengalami penurunan sampai tahun 2012 menyentuh angka 103,94% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 104,16. Adapun untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2010 mencapai 92,17 % pada tahun 2011 meningkat 0,46 % menjadi 92,63 % dan di tahun 2012 meningkat sangat signifikan yaitu mencapai 99,20% dan di tahun 2013 pencapain APK SMP/MTS sebesar 109,30 %, Untuk jenjang SMA/MA/SMK, APK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 berada pada angka 64,76%, tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK meningkat menjadi 68,31%, tahun 2012 mencapai 73,31% dan pada tahun 2013 mencapai 76,38%.

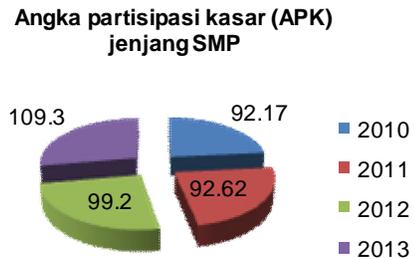
Angka partisipasi kasar masing-masing jenjang tingkat SD, SMP dan SMA/SMK untuk lebih rincinya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2  
Angka partisipasi kasar

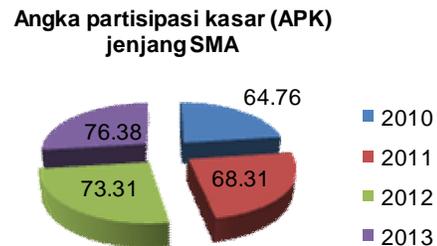
No.	Tahun Pelaksanaan	Capaian
1	2010	105.81
2	2011	105.81
3	2012	103.94
4	2013	104.16



No.	Tahun Pelaksanaan	Capaian
1	2010	92.17
2	2011	92.62
3	2012	99.2
4	2013	109.3



No.	Tahun Pelaksanaan	Capaian
1	2010	92.17
2	2011	92.62
3	2012	99.2
4	2013	109.3



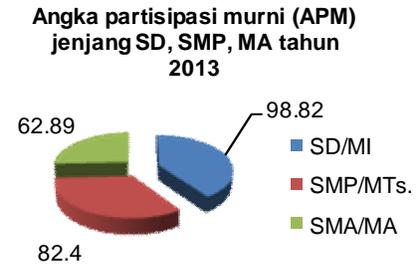
c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM pada tingkat SD/MI terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2010 di angka 91,69% mengalami peningkatan mencapai 98,82% di tahun 2013. APM jenjang SMP/MTS mengalami peningkatan untuk tahun 2010 baru mencapai 71,01 dan tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 11,39%. Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/MA/SMK juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 berada di angka 49,81%, pada tahun 2013 telah mencapai 62,89%. Ini artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 13,08% selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan uraian di atas, nilai untuk angka partisipasi murni tahun terakhir yakni tahun 2013 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA/SMK sebagai berikut.

Grafik 2.3  
Angka partisipasi murni

No.	Jenjang	Capaian
1	SD/MI	98.82
2	SMP/MTs.	82.4
3	SMA/MA	62.89



d. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 adalah sebesar 0,20% dan tersisa 0,17% pada tahun 2013. Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 0,54% terus mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 0,41%. Sementara Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMA/MA/SMK mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2010 sebesar 0,99% menjadi 0,26% pada tahun 2013.

e. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf termasuk dalam komponen pembentuk indeks pembangunan manusia. Angka buta huruf yang di rilis BPS saat ini masih menyisakan 20,41%, sementara data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat terkait pelaksanaan program penuntasan Buta Aksara pada awal tahun 2009 jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta aksara tercatat sebanyak 54.429 orang, angka yang cukup besar sebagai pijakan awal penyusunan program dan rencana aksi penuntasannya Dimulai dengan membelajarkan 7.601 orang pada 2009, kemudian pada Tahun 2010 membelajarkan 7.102 orang. Puncaknya pada Tahun 2011 secara merata diseluruh kecamatan se Kabupaten Lombok Barat telah dibelajarkan 36.700 orang, sehingga pada tahun 2012 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas masih tersisa 3.026 orang atau 0,70% dari jumlah penduduk Lombok Barat usia 15 tahun ke atas.

f. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan untuk jenjang SD/MI mencapai hasil yang cukup memuaskan dengan terjadinya peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 mencapai 99,94%, sementara pada tahun 2013 Angka Kelulusan untuk jenjang SD/MI di Kabupaten

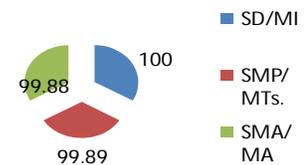
Lombok Barat mencapai 100%. Untuk jenjang SMP/MTs juga mengalami peningkatan, pada tahun 2011 mencapai 97,28%, dan 2013 menjadi 99,89%. Sementara angka kelulusan untuk jenjang SMA/MA/MK menunjukkan peningkatan yang sangat progresif. Pada tahun 2011 angka kelulusan mencapai 79,34%, tahun 2012 meningkat menjadi 99,55%, dan terus meningkat menjadi 99,88% di tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, angka kelulusan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs., dan SMA/MA secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4  
Angka Kelulusan

NO.	JENJANG	CAPAIAN
1	SD/MI	100
2	SMP/MTs.	99.89
3	SMA/MA	99.88

Angka Kelulusan Tahun 2013



#### 2.4. Kesehatan

Capaian penyelenggaraan urusan kesehatan dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator makro sebagai berikut ini:

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Jumlah kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009 mencapai 17 kasus dalam 1.000 kelahiran hidup, dimana jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 29 kasus kematian bayi dalam 1.000 kelahiran hidup. Secara umum Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 982,91 AKHB pada tahun 2009 menjadi 971 AKHB pada tahun 2013. Hal ini berarti peluang bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2009 atau dapat dikatakan pada tahun 2013 dari 1.000 kelahiran hidup bayi, probabilitas atau kemungkinan bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun adalah 971. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 sebanyak 10 kasus dalam 100.000 ibu melahirkan hidup, yang merupakan angka kematian ibu bersalin pada tahun tersebut. Dan untuk tahun 2013 tidak ditemukan kasus kematian ibu hamil dan kasus kematian ibu nifas.

## b. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2009 - 2012 mengalami perkembangan yang baik atau meningkat di setiap tahunnya. Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2009 mencapai 60,40 tahun, kemudian tahun 2010 mencapai 60,84 tahun, pada tahun 2011 mencapai 61,28 tahun dan pada 2012 mencapai angka 61,71 tahun

## c. Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus gizi buruk usia 0-5 tahun (balita) pada tahun 2009 di Kabupaten Lombok Barat mencapai 156 kasus dan mengalami penurunan sebesar 33,97% atau mencapai 103 kasus gizi buruk. Sedangkan menurut kecamatan pada tahun 2013 Kecamatan Batu Layar memiliki kasus gizi buruk tertinggi yakni mencapai 27 kasus atau 26,21% dan kecamatan yang memiliki kasus gizi buruk terendah yakni Kecamatan Narmada yakni mencapai 3 kasus gizi buruk atau 2,91%. Berdasarkan standar gizi buruk yang ditetapkan oleh *WHO*, terdapat 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan klasifikasi gizi buruk rendah sebab memiliki persentase dibawah 10%.

## 2.5. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Komposisi organisasi lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.

Organisasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012

No	Organisasi	Jumlah Eselon		
		II	III	IV
1	Sekretariat Daerah	4	10	29
2	Sekretariat DPRD	1	3	8
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	6	18
4	Dinas Kesehatan	1	5	15
5	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	6	18
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	5	15
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	5	15
8	Dinas Pariwisata	1	4	12

No	Organisasi	Jumlah Eselon		
		II	III	IV
9	Dinas Pekerjaan Umum	1	4	12
10	Dinas Pertambangan dan Energi	1	4	12
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	5	15
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	5	15
13	Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan	1	7	21
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	5	15
15	Dinas Kehutanan	1	5	15
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah	1	6	18
17	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	1	5	15
18	Inspektorat Kabupaten	1	5	3
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	6	13
20	Badan Kepegawaian Daerah	1	5	11
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	5	11
22	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1	5	11
23	Badan Lingkungan Hidup	1	5	11
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	5	11
25	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	1	4	9
26	Kantor Ketahanan Pangan Daerah	-	1	4
27	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1	6
28	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	1	4
29	Kantor Aset Daerah	-	1	4
30	Rumah Sakit Umum Daerah	-	5	9
31	Badan Pelaksana Penyuluhan	1	4	9
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	5	11
33	UPTD	-	-	176
34	Staf ahli	5	-	-

No	Organisasi	Jumlah Eselon		
		II	III	IV
35	Kantor Camat ( 10 Kecamatan )	-	20	80
36	Kelurahan	-	-	18

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011, Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini 12 SKPD yang menyusun SPM adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Tata Kota, Pertamanan Dan Kebersihan;
8. Badan Lingkungan Hidup;
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Kantor Ketahanan Pangan Daerah;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

#### 2.6. KEBIJAKAN UMUM DAERAH.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019 adalah: “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU**”.

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Lombok Barat**, artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.
2. **Unggul**, artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan

3. **Mandiri**, artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal
4. **Sejahtera**, artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya, ekonomi dan fisik
5. **Bermartabat**, artinya memiliki jati diri dan harga diri

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6(enam)misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama

**Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)**, ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan produktifitas produk sumberdaya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kondusifitas daerah.

2. Misi Kedua

**Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)** ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Misi Ketiga

**Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)** ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas dan legalitas budaya dan kearifan lokal dan meningkatkan keimananan dan ketaqwaan masyarakat.

4. Misi Keempat

**Mengembangkan Potensi sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)** ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan sumberdaya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah, meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.

5. Misi Kelima

**Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar sehat dan Cerdas)** ditujukan untuk Meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana social dasar.

6. Misi ke Enam

**Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat)** ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum

Ke enam misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya local serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam moto daerah “ **Patut patuh Patju**”,serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan,sebagai berikut:

a. **Good Governance (tata kelola pemerintahan)**, yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara *domain* negara,swasta dan masyarakat;

b. **Integrity (integritas)**, yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

c. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas)**, yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tatakelola yang transparan

d. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi

pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

**e. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi**, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan non-spasial (non keruangan).

*Sumber : RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019*

**BAB III**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

**3.1. SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

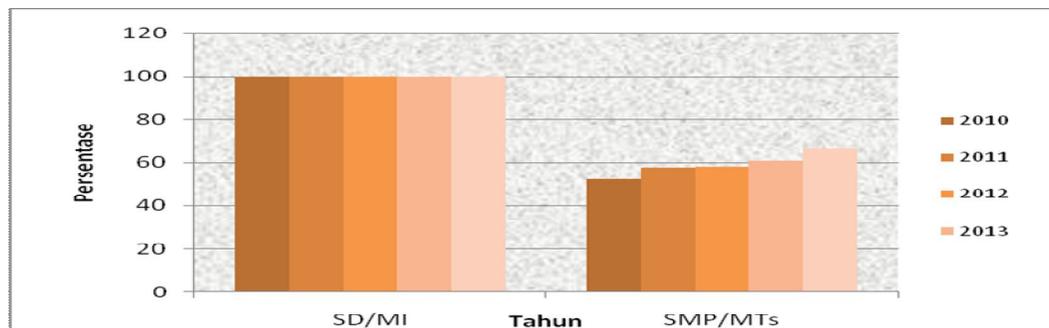
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota, jenis pelayanan dasar pada bidang Pendidikan Dasar meliputi :

- a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten, yang memiliki 14 (empat belas) indikator.
- b. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan, yang memiliki 13 (tiga belas) indikator.

Realisasi SPM Bidang Pendidikan Dasar semester I tahun 2014 diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

- a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten
  - 1). Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil :

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/ MI dalam jarak kurang dari 3 km	100%	100%	100%	100%	100%
2.	kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/ MTs dalam jarak kurang dari 6 km	52,58 %	57,75 %	58,44 %	61,15 %	66,62%

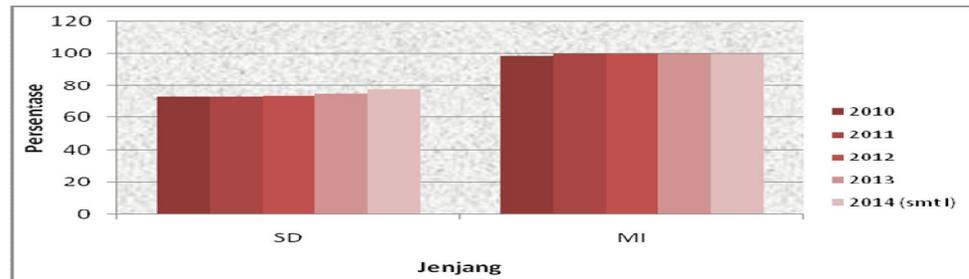


- 1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar

tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

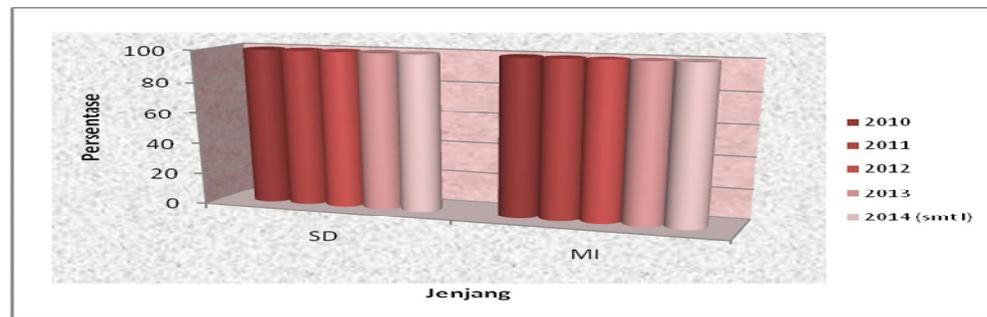
- b. SD/ MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang

No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	73,2%	73,12%	73,76%	75,05%	77,68%
2.	MI	98,78%	100%	100%	100%	100%



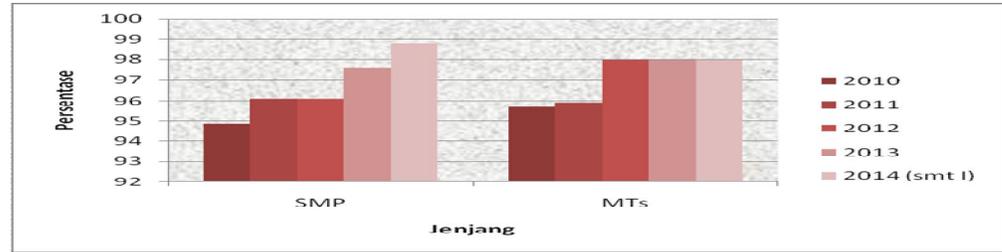
- c. SD/ MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel

No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1	SD	100%	100%	100%	100%	100%
2	MI	100%	100%	100%	100%	100%



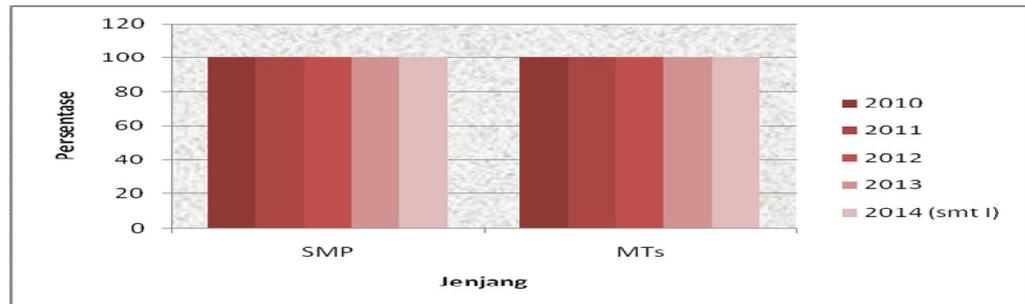
- d. SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang

No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1	SMP	94,87%	96,1%	96,1%	97,59%	98.80%
2	MTs	95,7%	95,92%	97,96%	97,96%	97,96%



e. SMP/ MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel

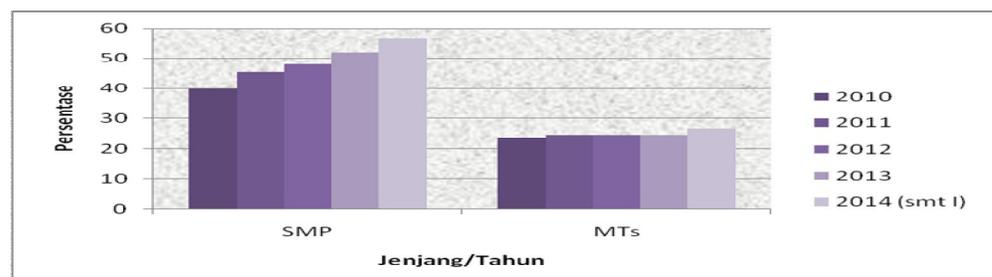
No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1	SMP	100%	100%	100%	100%	100%
2	MTs	100%	100%	100%	100%	100%



2) Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

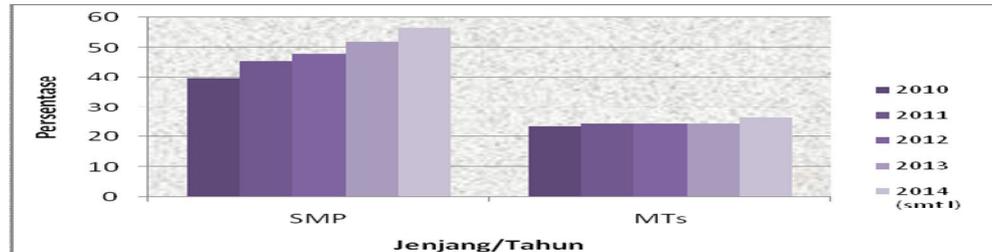
b. SMP/ MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik

No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	39,74%	45,45%	48,05%	51,81%	56,63%
2	MTs	23,66%	24,49%	24,49%	24,49%	26,,53%



- c. SMP/ MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

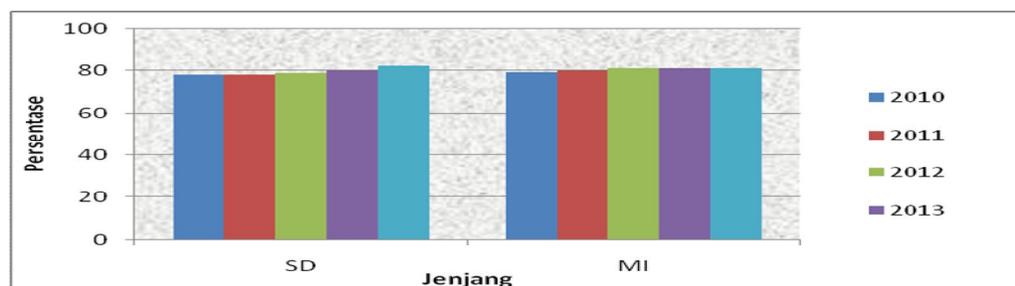
No.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	39,74%	45,45%	48,05%	51,81%	56,63%
2.	MTs	23,66%	24,49%	24,49%	24,49%	26,53%



- 3) Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

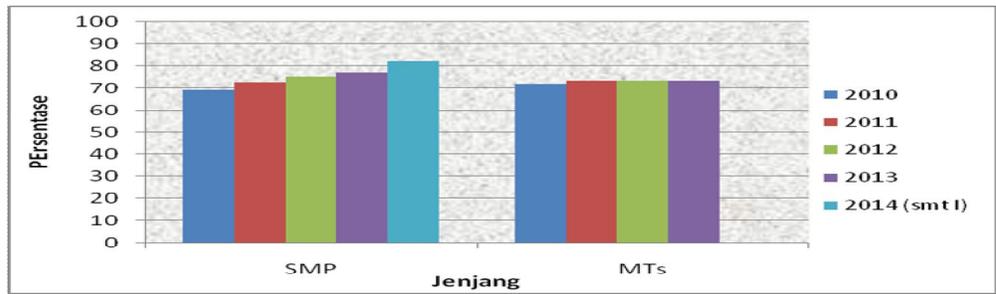
- b. SD/ MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan lainnya

No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	78,03%	78,03%	78,72%	80,00%	82,03%
2.	MI	79,27%	79,78%	80,90%	80,90%	80,90%



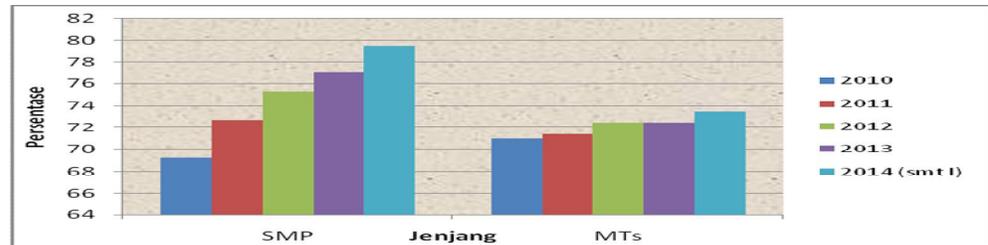
- c. SMP/ MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya

No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	69,23%	72,73%	75,32%	77,11%	81,93%
2.	MTs	72,04%	73,47%	73,47%	73,47%	75,51%



c. SMP/ MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan di lengkapi meja kursi

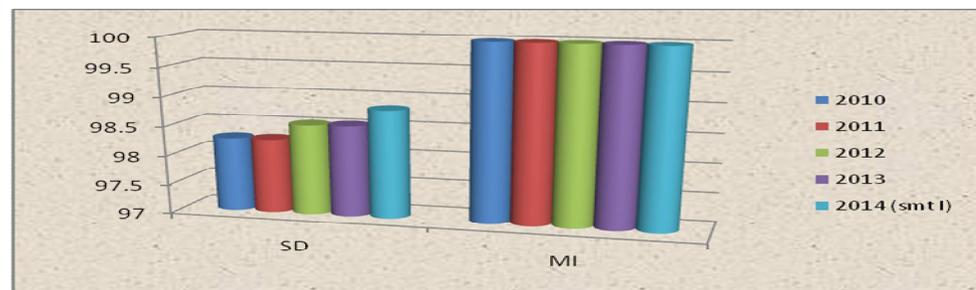
No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	69,23%	72,73%	75,32%	77,11%	79,52%
2.	MTs	70,97%	71,43%	72,45%	72,45%	73,47%



d. Di setiap SD tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus empat orang guru setiap satuan pendidikan

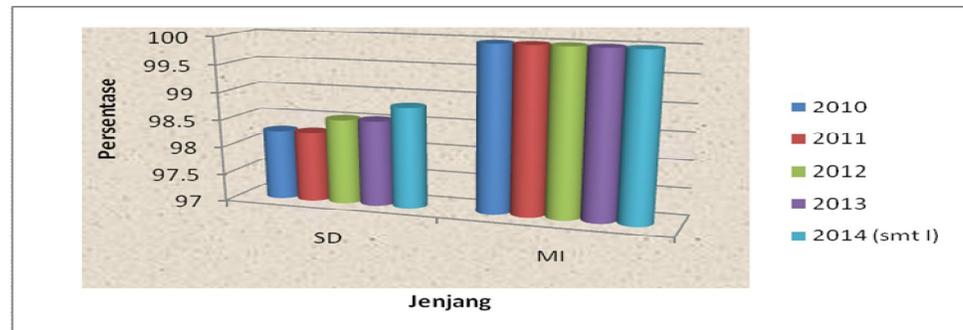
a. SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik

No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	98,27%	98,27%	98,54%	98,55%	98,84%
2.	MI	100%	100%	100%	100%	100%



- b. SD/ MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus

No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	98,27%	98,27%	99,13%	98,55%	98,84%
2.	MI	100%	100%	100%	100%	100%



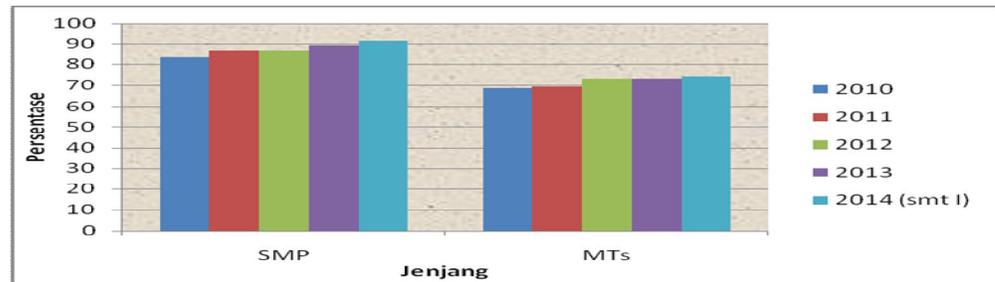
Jika dilihat dari setiap SD satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus empat orang guru setiap satuan pendidikan periode 2010, 2011, 2012, 2013 hingga semester I Tahun 2014 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pemenuhan 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik telah dilakukan namun untuk target capaian jumlah guru mencapai 100% dalam setiap satuan pendidikan terjadi kelebihan jumlah guru itupun terjadi pada setiap SD di kabupaten Lombok Barat baik guru PNS maupun Non PNS, sehingga diperlukan pemerataan agar tidak terjadi penumpukan guru dalam setiap satuan pendidikan dan pembagian jumlah jam mengajar dapat dilakukan dengan wajar sesuai dengan jumlah maksimum jam mengajar yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar.

- e. Di setiap SMP tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

- a. SMP/ MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [ atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran ]

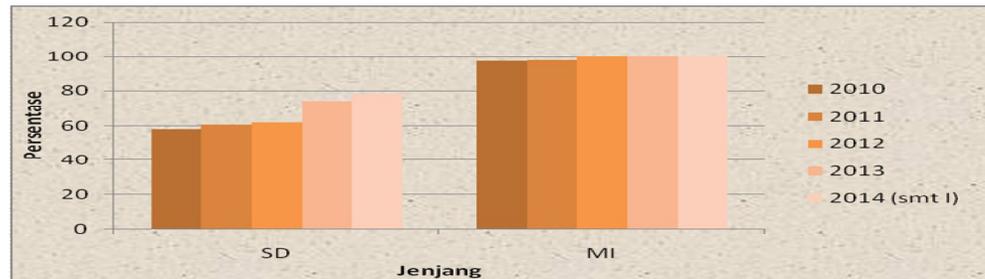
No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	83,33%	87,01%	87,01%	89,16%	91,57%
2	MTs	68,82%	69,39%	73,74%	73,47%	74,49%



f. Di setiap SD tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan dua orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

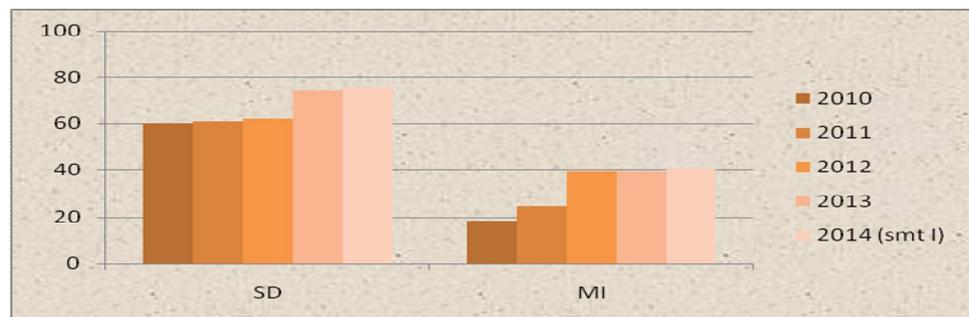
a. SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV

No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	58,38%	60,69%	62,10%	74,20%	78,26%
2	MI	97,56%	97,75%	100%	100%	100%



b. SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

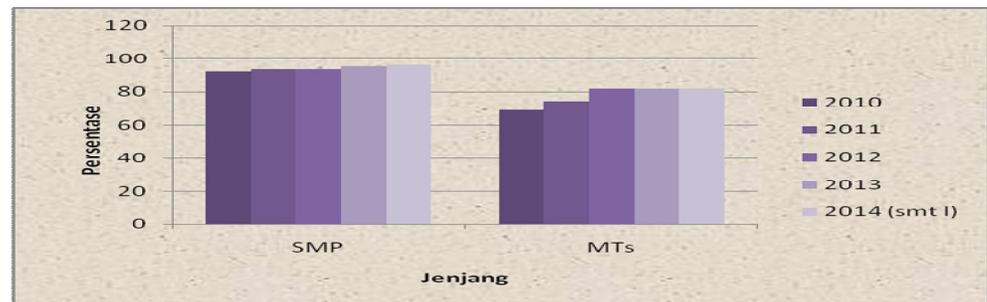
No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	59,83%	60,69%	62,10%	73,91%	75,36%
2	MI	18,29%	24,27%	39,33%	39,33%	40,45%



g. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

a. SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV  $\geq 70\%$  [untuk daerah khusus  $\geq 40\%$ ]

No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	92,31%	93,51%	93,51%	95,18%	96,39%
2	MTs	68,82%	74,49%	81,36%	81,36%	81,36%



b. SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik  $\geq 35\%$  [untuk daerah khusus  $\geq 20\%$ ]

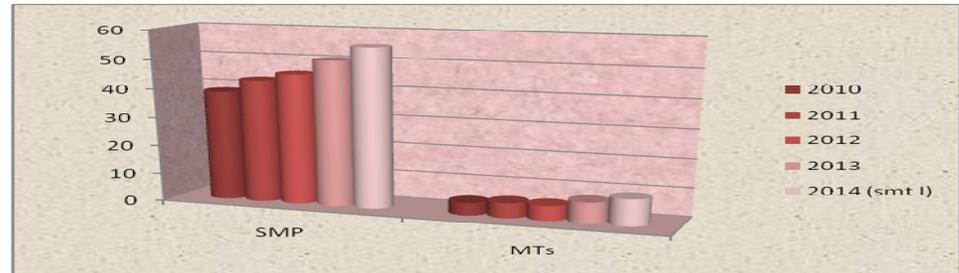
No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	41,03%	45,45%	48,05%	50,60%	55,42%
2	MTs	6,45%	6,12%	16,33%	16,33%	20,41%

untuk pencapaian target SPM, pada tahun 2014 Dinas Pendidikan telah melakukan *workshop* sertifikasi guru dan program profesi guru yang dilaksanakan secara bertahap bagi guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru.

h. Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

a. SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn

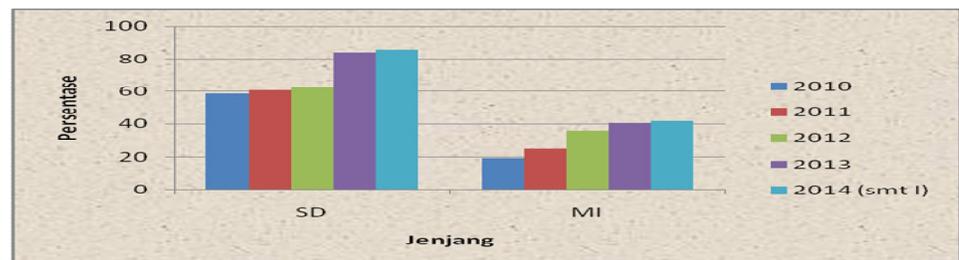
No.	Jenjang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	38,46%	42,86%	45,45%	50,60%	55,41%
2	MTs	4,30%	5,10%	5,10%	7,14%	9,18%



i. Di setiap kabupaten semua kepala SD berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

a. Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik

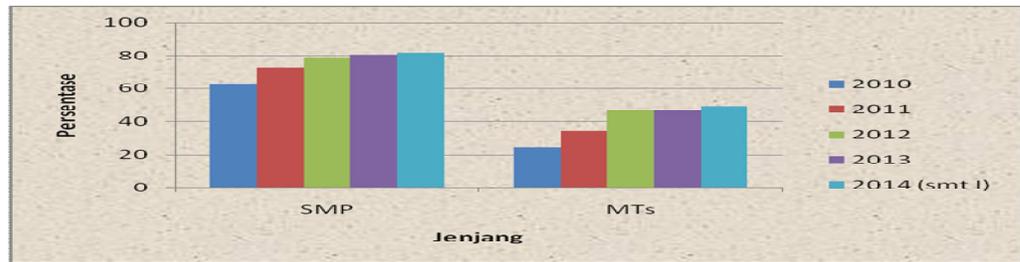
No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	58,67%	60,69%	62,39%	84,06%	85,51%
2	MI	19,51%	24,72%	35,96%	40,45%	41,57%



j. Di setiap kabupaten semua kepala SMP berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

a. SMP/MTs yang memiliki Kepala SMP/Mtsberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

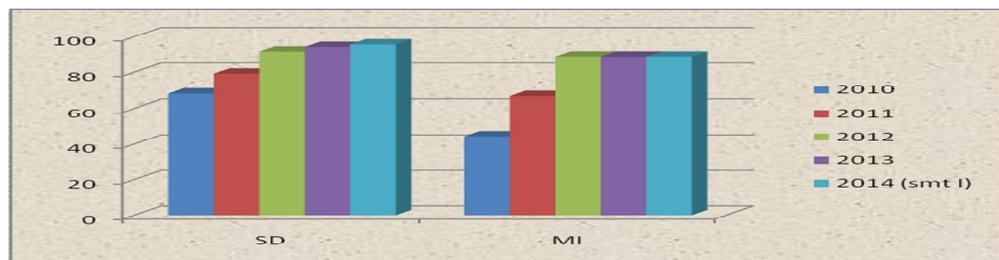
No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	62,82%	72,73%	79,22%	80,72%	81,93%
2	MTs	24,73%	34,69%	46,94%	46,94%	48,98%



k. Di setiap kabupaten semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

a. pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik

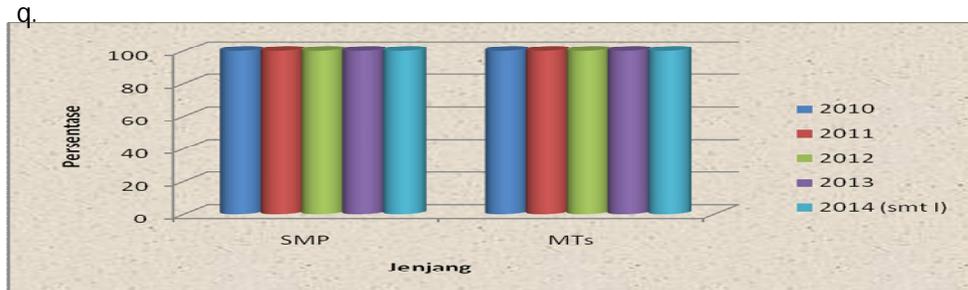
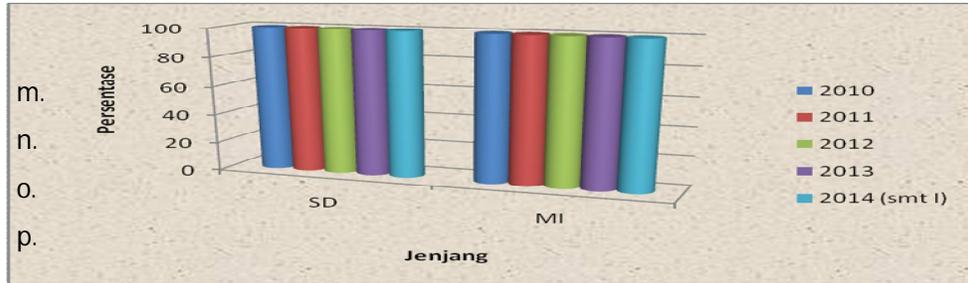
No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	68,06%	79,17%	91,67%	94,29%	95,71%
2	MI	44,44%	66,67%	88,89%	88,89%	88,89%



l. Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

a. kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

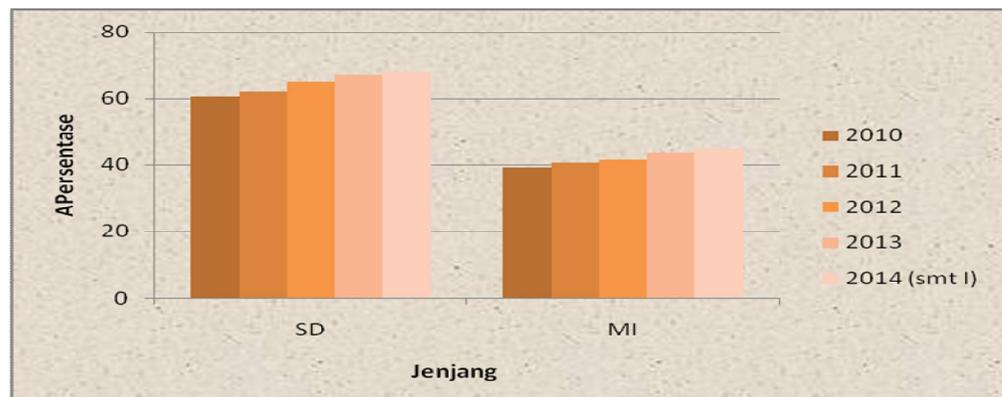
No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



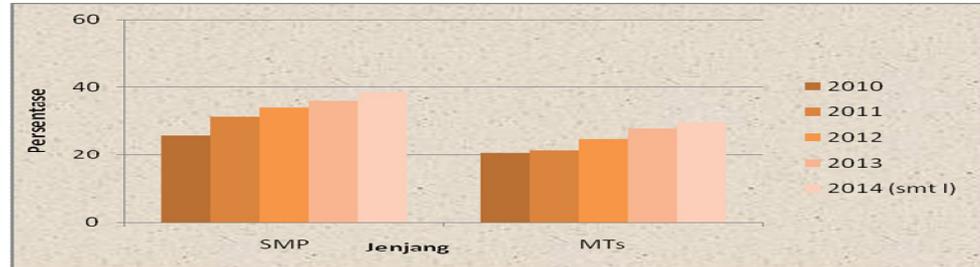
m. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

a. SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama  $\geq 3$  jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	60,69%	62,14%	65,01%	67,25%	68,12%
2.	MI	39,02%	40,45%	41,57%	43,83%	44,94%



- b. SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama  $\geq 3$  jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

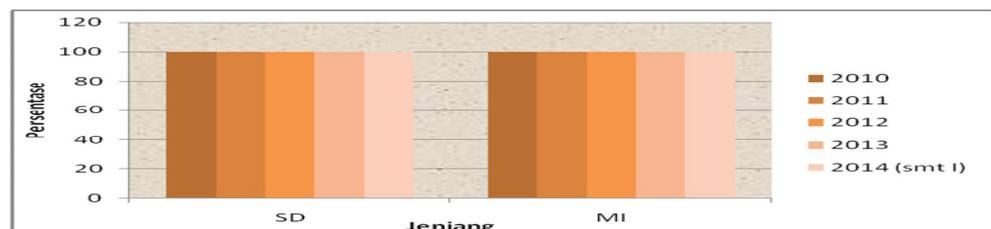


Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, pengawas melakukan pengawasan ke satuan pendidikan minimal 5 (lima) sekolah/madrasah binaan untuk daerah khusus atau paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah/madrasah binaan untuk daerah yang bukan daerah khusus yang dilakukan dalam setiap 1 (satu) bulan. Dan setiap kunjungan pengawas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian baik kegiatan supervisi akademik atau kegiatan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, dimana pelaksanaan tersebut membutuhkan waktu 3 jam atau lebih dalam setiap satuan pendidikan.

B. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :

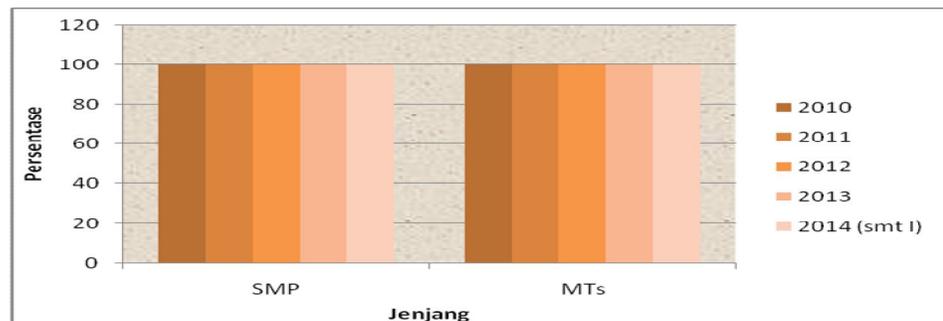
- 15). setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



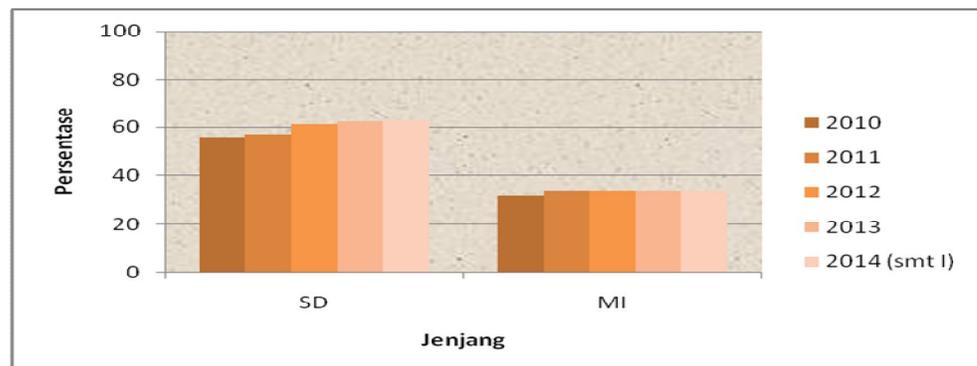
- 16). Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



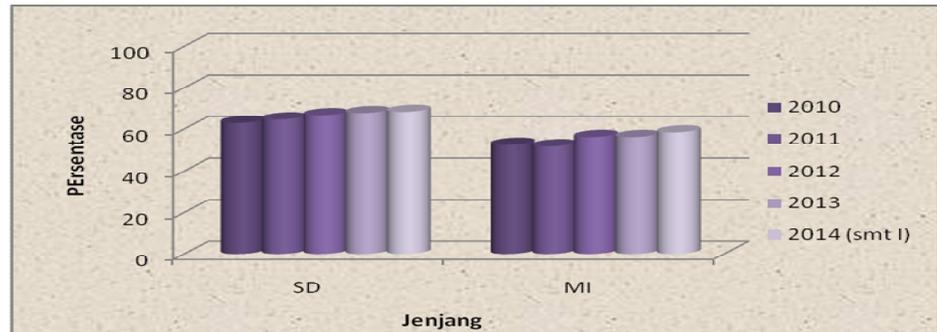
- 17). Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	56,07%	57,23%	61,22%	62,32%	62,90%
2.	MI	31,71%	33,71%	33,71%	33,71%	33,71%

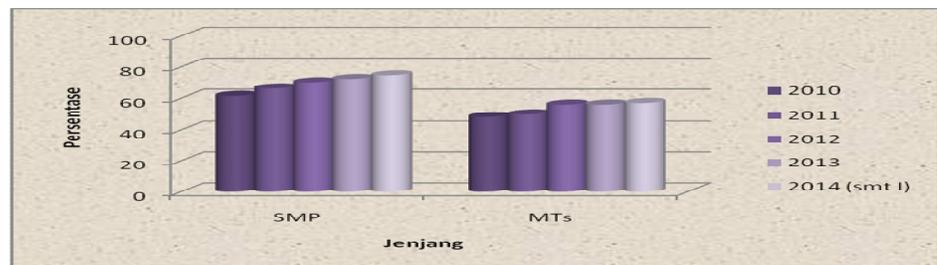


- 18). Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD	63,01%	64,74%	66,76%	67,83%	68,41%
2.	MI	52,44%	51,69%	56,18%	56,18%	58,43%

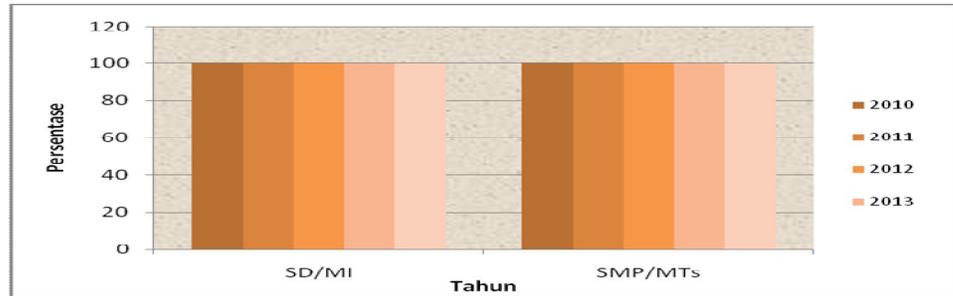


No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SMP	61,54%	66,23%	70,13%	72,29%	74,70%
2.	MTs	48,39%	50%	56,12%	56,12%	57,14%



- 19). setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

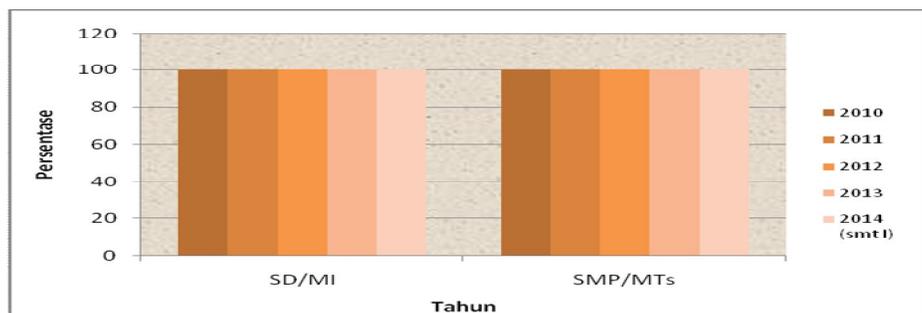
No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



20). satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

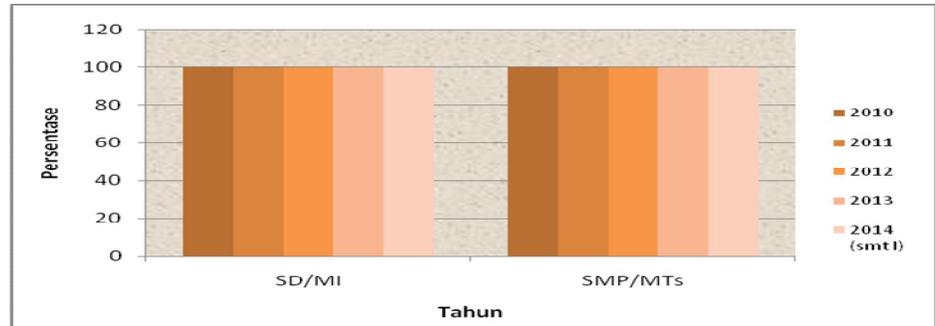
- a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
- b) Kelas III : 24 jam per minggu;
- c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
- d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



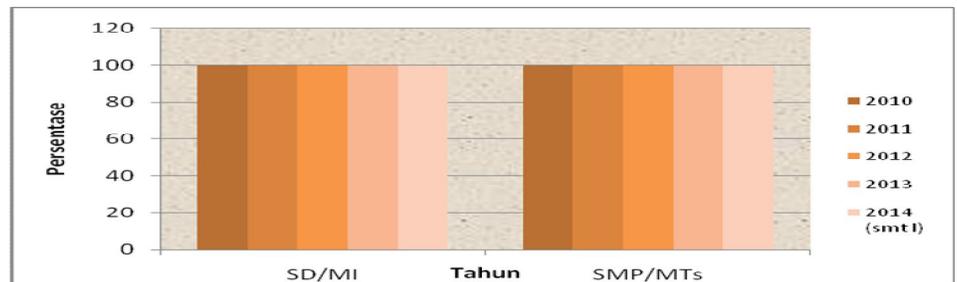
21). Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%		
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%		



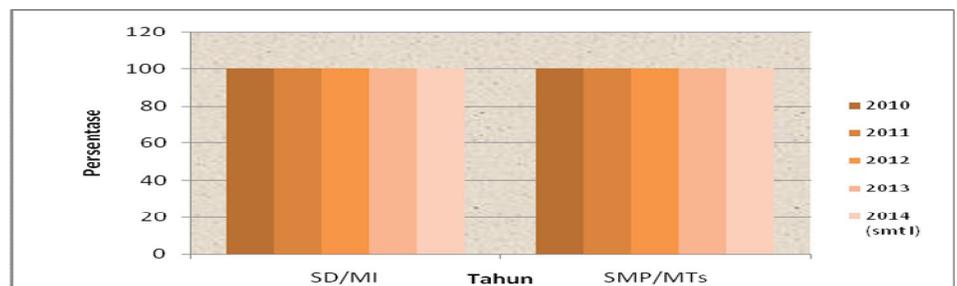
22). Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



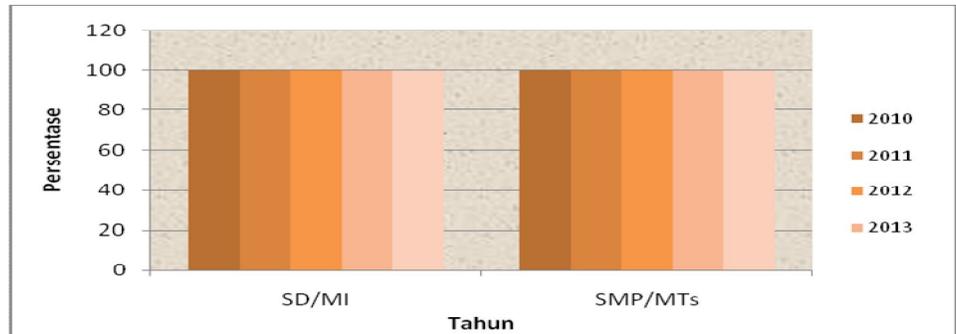
23). setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



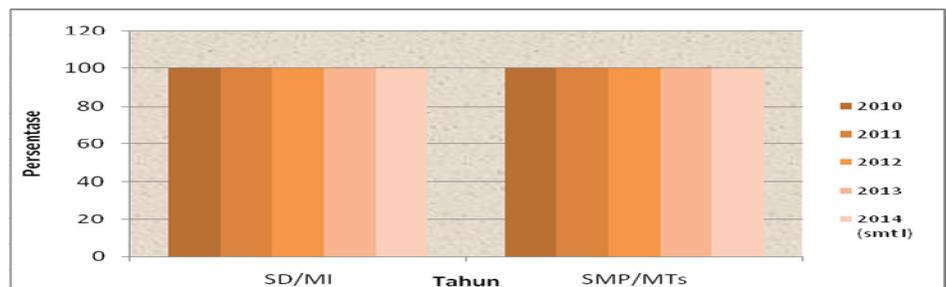
- 24). Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



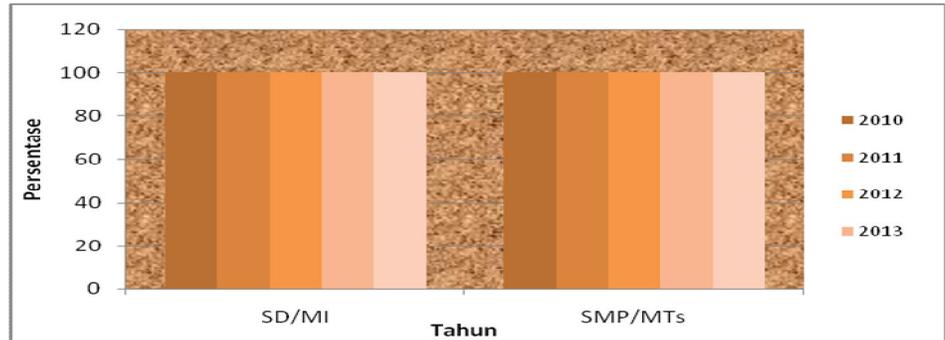
- 25). Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



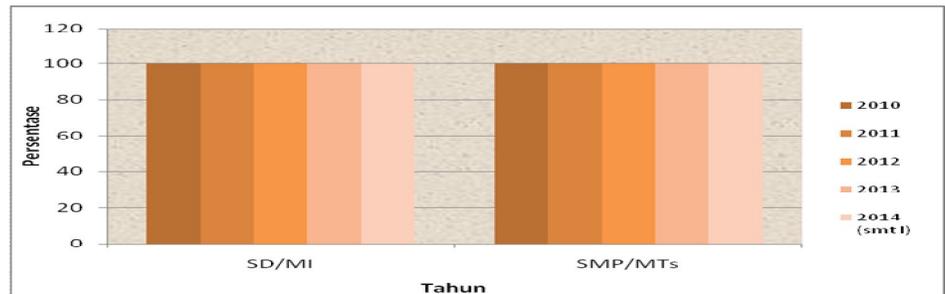
- 26). Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota pada setiap akhir semester;

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



27). setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (smt I)
1.	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%



### 3.2. SPM BIDANG KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota, terdapat 4 (empat) jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu :

1. Pelayanan kesehatan dasar terdiri dari 18 indikator kinerja
2. Pelayanan kesehatan rujukan, terdiri dari 2 indikator kinerja
3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, terdiri dari 1 indikator; dan
4. Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat , terdiri dari 1 indikator

#### A. Capaian SPM

Capaian SPM bidang Kesehatan Tahun 2013, dan Capaian SPM Semester I (Periode: Januari s/d Mei 2014) sesuai target pencapaian SPM yang ditetapkan , diuraikan sebagai berikut :

##### a. Pelayanan Kesehatan Dasar

#### 1. Cakupan Kunjungan ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 diperoleh dari perhitungan persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) oleh tenaga kesehatan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan ibu hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 84,21% (13779 ibu hamil K4 dari 16362 ibu hamil) dari target 95%. Sementara Cakupan ibu hamil K4 Periode Bulan Januari hingga Mei tahun 2014 sebesar 35,99 %, dengan Target bulan Mei sebesar 39,58 dan pada akhir tahun 2014 adalah 95%. Target untuk bulan Mei sudah terpenuhi dan Dinas kesehatan Kabupaten Lombok Barat optimis dapat mencapai Target tahun 2014.

#### 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, didapat dari perhitungan persentase jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil beresiko di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.

Cakupan komplikasi kebidanan ditangani pada tahun 2013 sebesar 111,81% (3.659 komplikasi ditangani dari 3272 sasaran ibu hamil mengalami komplikasi) dari target sebesar 90%. sementara Cakupan komplikasi kebidanan ditangani bulan Januari hingga Mei tahun 2014 sebesar 50,18 % dengan target pada Bulan Mei 2014 sebesar 34,17. Kami optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2014 yakni sebesar 90%. Pencapaian yang sudah mencapai target bulan Mei tidak lepas dari usaha Dinas Kesehatan Kab.Lombok Barat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan minimal kepada masyarakat.

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebesar 85,57% (13.364 ditolong tenaga kesehatan dari 15.618 ibu bersalin) dari target sebesar 94%. Sementara Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada periode bulan januari sampai bulan Mei 2014 adalah sebesar 35,96 dari target Bulan Mei sebesar 37,50. Capaian persalian oleh Nakes masih sedikit dibawah Target yang ditentukan hal ini karena masih adanya beberapa ibu hamil yang melahirkan pada dukun. Namun Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok barat optimis dapat mencapai target tahun 2014 yakni sebesar 90%. Melalui upaya kemitraan dengan dukun, pelaksanaan kelas ibu maupun kegiatan yang mendorong upaya tercapainya pertolongan persalian di tenaga kesehatan.

4. Cakupan pelayanan ibu nifas

Cakupan pelayanan nifas, dihitung dari jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas pada tahun 2013 sebesar 82,20% (12.838 mendapat pelayanan nifas dari 15618 ibu hamil) dari target tahun 2013 sebesar 90%. Sementara Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas pada bulan januari hingga mei 2014 sebesar 33,42% dari target bulan mei sebesar 29,17. Sementara target unuk tahun 2014 sebesar 90%. Capaian hingga bulan mei sudah melewati target yang di tentukan.

Berdasarkan empat jenis indikator di atas, dapat digambarkan grafik capaian kinerjanya sebagai berikut.



#### 5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan dibagi dengan jumlah keseluruhan neonatus yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani pada tahun 2013 sebesar 49,87% (1006 komplikasi ditangani dari 2017 sasaran neonatus) dari target sebesar 80%. Sementara Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani pada periode bulan januari hingga mei 2014 sebesar 50,04 dari target sebesar 34,17. Capaian ini sudah melewati target dan juga diharapkan dapat mencapai target di akhir tahun 2014 sebesar 80%.

#### 6. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi, didapat dari perhitungan persentase jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah bayi yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Diasumsikan bayi yang berusia 12 bulan telah mendapat 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu memperoleh imunisasi lengkap, mendapatkan vitamin A 1x, dilakukan pemantauan tumbuh kembang sebanyak 4x dan kalau sakit dilakukan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 sebesar 88,24% (13125 bayi dari 14875 bayi) sdari target sebesar 90%. Sementara cakupan kunjungan bayi pada bulan Januari hingga Mei 2014 sebesar 36,27% dari target bulan mei sebesar 38,33 %. Hal ini disebabkan karena beberapa factor seperti bayi yang dikunjungi untuk mendapatkan

pelayanan sakit, pengetahuan ibu tentang pentingnya pelayanan untuk bayi. Untuk tahun 2014 target yang ingin dicapai sebesar 90%. Dinas kesehatan kab.Lombok Barat optimis dapat mencapai target tersebut melalui kegiatan kelas ibu yang memberdayakan ibu dan keluarga dalam menunjang pelayanan KIA khususnya cakupan pelayanan bayi.

#### 7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

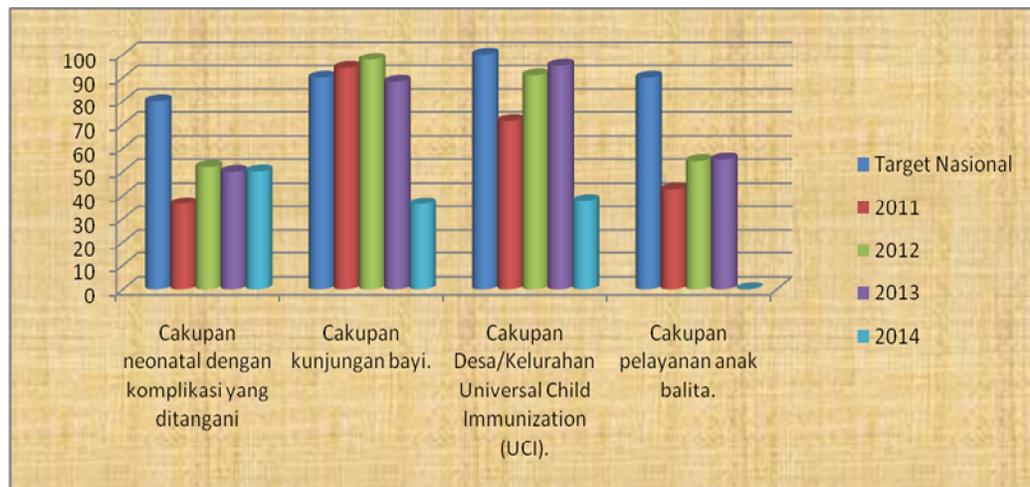
Pada tahun 2013, pengisian data cakupan UCI dibagi 2 kategori. Pertama disebut dengan UCI individu, yang dimaksud adalah target bayi 100% harus terpenuhi 80%. Kedua disebut UCI antigen, yang dimaksud adalah perlindungan dini awal 95% dan kelengkapan 90%.

Cakupan penemuan desa/kelurahan UCI antigen pada tahun 2013 sebesar 95,08% (116 desa/kelurahan dari 122 desa/kelurahan) dari target sebesar 100%. Tahun 2014 kegiatan tersebut tetap dilakukan. Cakupan penemuan desa/kelurahan UCI antigen pada tahun 2013 sebesar 95,08% (116 desa/kelurahan dari 122 desa/kelurahan) sedangkan target pada tahun 2013 adalah 100%. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), diperoleh dari perhitungan persentase jumlah desa/kelurahan UCI dibagi dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada. Sementara cakupan untuk tahun 2014 hingga bulan Mei sebesar 37,70%.

#### 8. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2013 sebesar 55% (32726 anak balita mendapat pelayanan kesehatan dari 59500 anak balita) dari target sebesar 90%. Sementara Cakupan pelayanan anak balita yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8x dalam setahun dan pemantauan perkembangan 2 kali setahun dan suplementasi vit A dosis tinggi 2 kali setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Cakupan pelayanan anak balita pada bulan januari hingga mei 2014 sebesar 25% masih dibawah target bulan mei yakni sebesar 29%. Target untuk tahun 2014 sebesar 90%.

Berdasarkan empat indikator di atas, dapat digambarkan grafik capaian kinerjanya sebagai berikut.



9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Cakupan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) pada anak usia 6-24 bulan, sebanyak 100% (BGM Gakin). Prioritas diberikan pada balita usia 6-24 bulan BGM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin. Cakupan MP-ASI pada balita gakin, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gakin yang mendapat MP-ASI dibagi dengan jumlah seluruh balita gakin yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan balita gakin secara keseluruhan, anggaran untuk penyediaan MP-ASI tidak mencukupi, sehingga MP-ASI diprioritaskan pada balita BGM Gakin. Tahun 2014 tidak ada pemberian MP – ASI pada anak usia 6-24 bulan

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Dalam kurun waktu 3 tahun balita gizi buruk yang ditemukan 100% mendapat perawatan. Kegiatan ini harus diikuti dengan surveilans gizi yang dilaksanakan, semakin dini ditemukan semakin mudah intervensinya. Di samping itu Taman Pemulihan Gizi masih dikembangkan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak balita dibawah garis merah dan pemberdayaan keluarga sadar gizi dalam bentuk salah satunya penyuluhan kadarzi untuk keluarga mantan gizi buruk dan lomba kader kadarzi. Kegiatan tersebut berupa intervensi dan edukasi untuk mencegah dan menangani gizi buruk. Jumlah cakupan gizi buruk yang mendapatkan

perawatan telah 100%, dimana setiap ditemukan Gizi buruk dilakukan perawatan yang intensif terhadap balita tersebut.

11. Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat

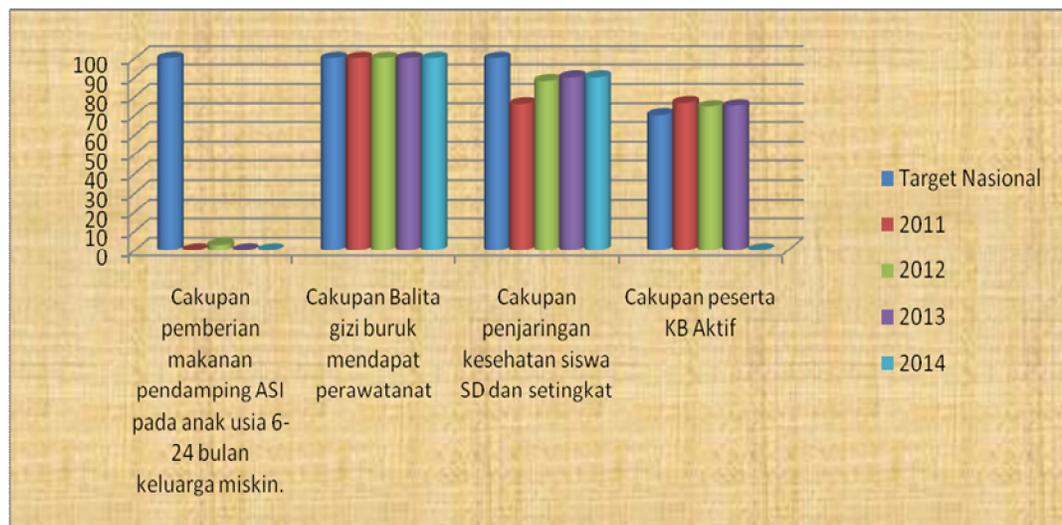
Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 pada tahun 2013 sebesar 89,98% ( 9592 siswa mendapat penjarangan dari 10660 siswa SD/MI kelas 1) dari target sebesar 100%, . sementara Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjarangan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kegiatan penjarangan ini dilakukan setiap setahun sekali sehingga untuk data pada semester awal tahun 2014 ini masih memakai data tahun 2013 yakni sebesar 89,98% ( 9592 siswa mendapat penjarangan dari 10660 siswa SD/MI kelas 1) sedangkan target pada tahun 2013 adalah 100%, masih di bawah target.

12. Cakupan peserta KB aktif

Cakupan KB aktif pada tahun 2013 sebesar 75% (105.507 peserta KB aktif dari 140.668 PUS)dari target sebesar 70% Sementara cakupan peserta KB aktif, didapat dari perhitungan persentase jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada pada kurun waktu tertentu. Cakupan KB aktif hingga bulan Mei 2014 sebesar 25 % dari target bulan Mei sebesar 29%. Sementara untuk tahun 2014 target yangharus di capai Dinas kesehatan sebesar 75%.

Berdasarkan empat indikator di atas, dapat digambarkan grafik capaian kinerjanya sebagai berikut.



13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. Penemuan penderita AFP

Target cakupan penemuan penderita penyakit AFP penduduk usia  $\leq 15$  tahun pada tahun 2013 adalah  $\geq 2$  penduduk. Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Cakupan penemuan penderita AFP penduduk usia  $\leq 15$  tahun, pada tahun 2013 sebanyak 6 kasus, sedangkan target pada tahun 2013 adalah  $\geq 2$  penduduk, artinya sudah mencapai target yang ditentukan.

b. Penemuan penderita pneumonia balita

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita penemuan dan penanganan penderita ISPA PNEUMONIA BALITA. Hingga bulan Mei tahun 2014 jumlah penderita pneumonia balita yang ditemukan sebesar 34,99% dari target 100% yang diharapkan tercapai tahun 2014.

c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB (BTA+) hingga bulan Mei 2014 sebesar 11,08%. target yang diinginkan yaitu pada akhir tahun 2014 sebesar 100%. Hal yang menyebabkan rendahnya capaian ini karena Kontribusi Pemerintah Daerah terutama dalam Ketersediaan obat TB gratis dan masih rendahnya Kontribusi Swasta/Masyarakat terutama Pengawas minum obat (PMO) untuk keberhasilan penanganan pasien TB.

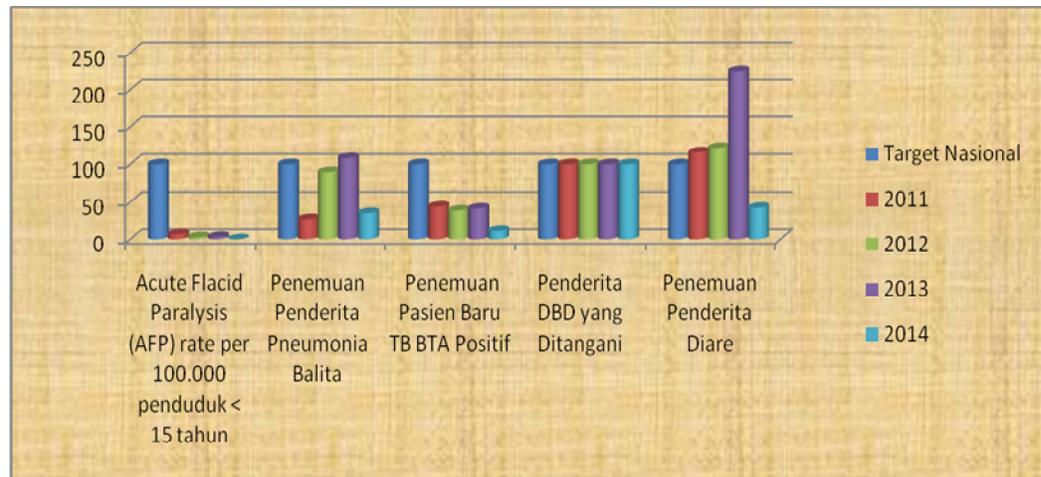
d. Penemuan dan penanganan penderita DBD

Setiap penemuan penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) maka kami melakukan penanganan secara total, pelacakan kasus, hingga perawatan yang bekerja sama dengan RS untuk lebih mendapatkan data lengkap terhadap kasus di wilayah Kabupaten Lombok barat. Setiap Dimana penemuan penderita semuanya ditangani 100%.

e. Penanganan penderita diare

Capaian penanganan penderita Diare hingga Mei 2014 sebesar 42,25% dari target sebesar untuk tahun 41,6% . sedangkan target untuk tahun 2014 sebesar 100%.

Berdasarkan lima indikator di atas, dapat digambarkan capaian kerjanya sebagai berikut.



f. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Dasar bagi maskin merupakan jumlah kunjungan baru dan lama masyarakat miskin diwilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sejak berlakunya system BPJS di Kabupaten Lombok barat kiranya penentuan definisi operasional dan pembagi dari DO tersebut. Hingga bulan Mei tahun 2014 cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 33,48% dari target bulan Mei sebesar 41,66 %.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan pasien bagi masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Tingginya target yang diberikan yakni sebesar 100% bagi kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dimana dimaksudkan dalam DO bahwa semua masyarakat miskin yang sakit haruslah mendapatkan rujukan. Hal ini sangat sulit untuk dicapai, sehingga perlu adanya perubahan penetapan target dan definisi operasional. Hingga bulan Mei 2014 jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin hanya sebesar 2,03%.

2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

Cakupan IGD level I di Rumah Sakit adalah 100%. Dari 1 Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang telah memenuhi kriteria IGD Level I, yaitu

mempunyai dokter *on site* (berada di tempat) 24 jam dengan pelatihan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

1. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Di awal tahun 2014 terjadi KLB di Dusun Mekaki sebagai dampak dari dibukanya lahan pengembangan wisata. Tetapi telah dilakukan penanganan 100%. Adanya komitmen dari petugas surveilans di tingkat puskesmas yang aktif melaporkan dan melacak, hal ini dikarenakan pengetahuan petugas semakin baik akan definisi operasional KLB dan cara menanggulangnya.

d. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

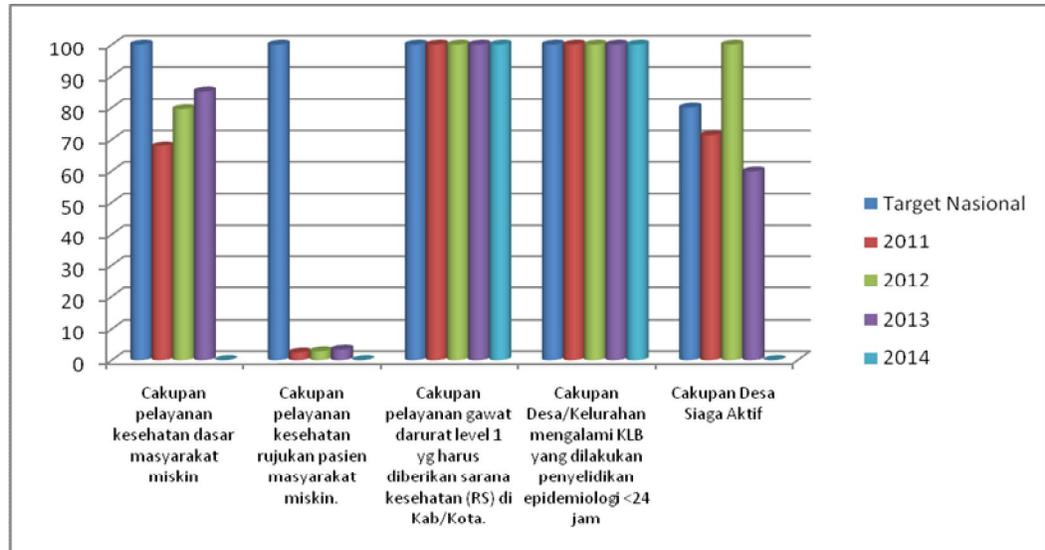
1. Cakupan desa siaga aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif (Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri) dari 122 desa/kelurahan. Desa dan kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa, atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti pusat kesehatan masyarakat, atau sarana kesehatan lainnya, serta penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2013 adalah 59.84 % (73 desa) dari 122 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok barat , sedangkan target tahun 2013 adalah sebesar 100 % (122 desa) belum memenuhi target dari yang ditargetkan, beberapa penyebab belum tercapainya cakupan Desa Siaga Aktif dari target yang ada selain disebabkan oleh terbatasnya dana yang ada juga dipengaruhi oleh perubahan definisi operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Pusat yang dirasa persyaratan untuk dikatakan Desa Siaga Aktif semakin ketat dan sangat selektif sekali.

Untuk tahun 2014 target yang harus dicapai sebesar 80%, capaian masih menggunakan data tahun 2013 yakni sebesar 59,84% sebanyak 73 desa siaga.

Berdasarkan lima indikator di atas, dapat digambarkan grafik capaian kinerjanya sebagai berikut.



### 3.3. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

#### 1. Bidang Sumber daya air

SPM bidang sumber daya air jenis layanan Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat untuk capaian tahun 2014 penyediaan air baku 100 % sementara realisasi secara kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2014 sebesar 33.12%, dengan demikian sampai dengan tahun 2014 target yang harus dicapai 66.88%. Sedangkan untuk penyediaan air irigasi 70 % dengan realisasi secara kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2014 sebesar 44.28%, dengan demikian sampai dengan tahun 2014 target yang harus dicapai sebesar 25.72%.

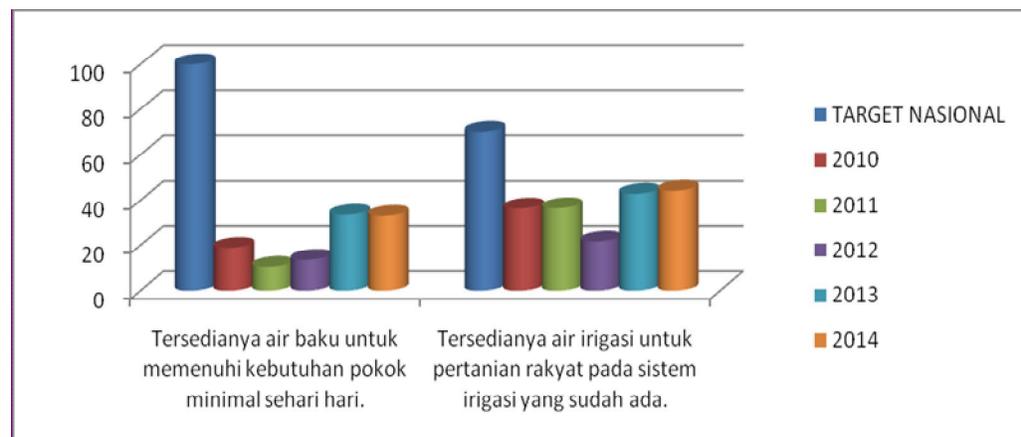
Permasalahan yang dihadapi dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum khususnya bidang sumberdaya air yakni berkaitan dengan semakin berkurangnya debit sumber-sumber air sebagai akibat dari menurunnya kondisi lingkungan cathment area penyedia air, semakin berkembangnya pertumbuhan sektor lain yang membutuhkan air, menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga pelestarian sumber-sumber air, serta lemahnya penerapan sanksi terhadap penyebab kerusakan lingkungan yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air.

Dalam rangka menghadapi permasalahan di atas, beberapa langkah/tindakan yang dilakukan diantaranya adalah komitmen tinggi untuk pemeliharaan sumber-sumber air dengan menyiapkan program khusus dan pembiayaannya, penguatan regulasi terkait dengan prioritas pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai sector, meningkatkan kepedulian masyarakat dan seluruh *stakeholder* air untuk menjaga

kelestarian sumber-sumber air, penerapan sanksi yang tegas bagi perusak lingkungan/sumber-sumber air.

Adapun Jumlah anggaran yang tersedia tahun 2014 apabila dikaitkan dengan realisasi capaian SPM sumber daya air dan kebutuhan anggaran untuk mencapai target SPM tahun 2014 maka kebutuhan anggarannya masing-masing ; 1). Pemenuhan air baku sisa target tahun 2014 sebesar 62.52% dengan kebutuhan anggaran Rp.22.218.000.000, sedangkan 2). Ketersediaan air irigasi target tahun 2014 sebesar 27,08% dengan kebutuhan anggaran Rp. 6.500.000.000.

Berdasarkan uraian di atas, indikator tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari dan tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dari bidang sumberdaya air, maka dapat digambarkan grafik capaiannya sebagai berikut.



## 2. Bidang Prasarana Jalan

SPM bidang prasarana jalan untuk tahun 2014 untuk jaringan aksesibilitas 100%, Mobilitas sebesar 100% dan Keselamatan sebesar 60 % sementara untuk realisasi pencapaian pada tahun 2014 pada semester I masing-masing untuk jaringan aksesibilitas dan keselamatan masing-masing 77.20% dan 74,84 %, sedangkan untuk jaringan mobilitas angka capaiannya sebesar 106.12 % hal ini dimungkinkan karena adanya kesalahan dalam penghitungan letak kategori kelas jalan Kabupaten Lombok barat sesuai Permen PU.

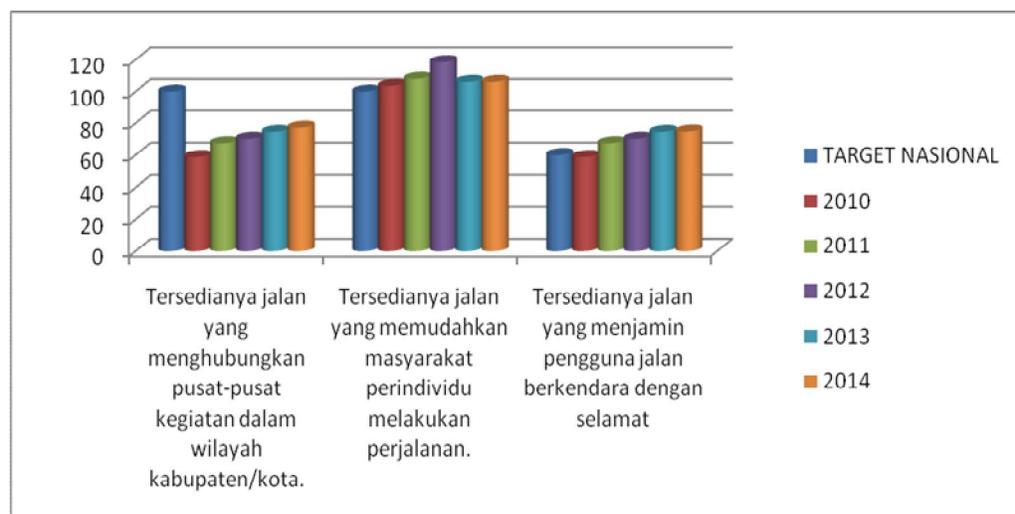
Untuk capaian layanan kondisi jalan dan kecepatan yang target capaiannya pada tahun 2014 masing-masing 60 % dengan realisasi untuk masing-masing layanan tersebut mencapai 74,84%. Dari data tersebut realisasi layanan melampaui target yang ditetapkan sebesar 14,84%.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah keterbatasan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan, belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab pengaturan arus transportasi kendaraan dengan beban gandar melebihi kapasitas jalan yang mengakibatkan cepatnya kerusakan jalan, belum optimalnya kepedulian masyarakat didalam pemeliharaan jalan.

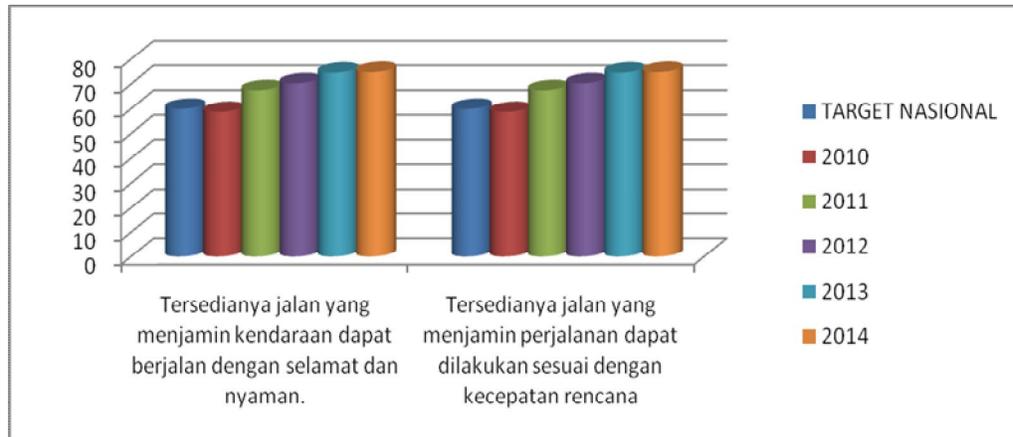
Dalam mengatasi permasalahan di atas, beberapa langkah yang dilakukan diantaranya adalah diupayakan terobosan mencari sumber pembiayaan untuk perbaikan jalan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengendalian transportasi, sosialisasi ketentuan peraturan perundangan tentang pembinaan jalan.

Disamping itu dalam pelaksanaan SPM tersebut, berkaitan dengan jumlah anggaran yang teralokasi untuk pelaksanaan fungsi tugas dalam tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 11.117.711.400 dan jumlah personel sebanyak 47 orang, sedangkan jumlah anggaran yang tersedia tahun 2014 apabila dikaitkan dengan realisasi capaian SPM untuk layanan jaringan aksesibilitas dan kebutuhan anggaran untuk mencapai target SPM tahun 2014 sebesar 25,41 % dengan kebutuhan anggarannya Rp.27.907.500.000.

Berdasarkan uraian di atas, indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (aksesibilitas), tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas), tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan), maka dapat digambarkan grafik capaian kinerjanya sebagai berikut.



Disamping itu, indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) dan tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan), maka dapat digambarkan grafik capaiannya sebagai berikut.



### 3. Bidang Prasarana Air Minum

SPM bidang prasarana air minum untuk capaian tahun 2014, penyediaan air minum untuk cluster pelayanan 100 % (kategori sangat baik), sementara realisasi secara kumulatif dari tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2014 sebesar 53.04%. hal ini disebabkan hanya sebatas pencapaian untuk penyediaan air dari pipa terlindungi yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait karena terdapat titik-titik untuk pemenuhan kebutuhan air yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya belum dapat direkam secara pasti, dengan demikian sampai dengan tahun 2014 khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum target yang harus dicapai 46.96%.

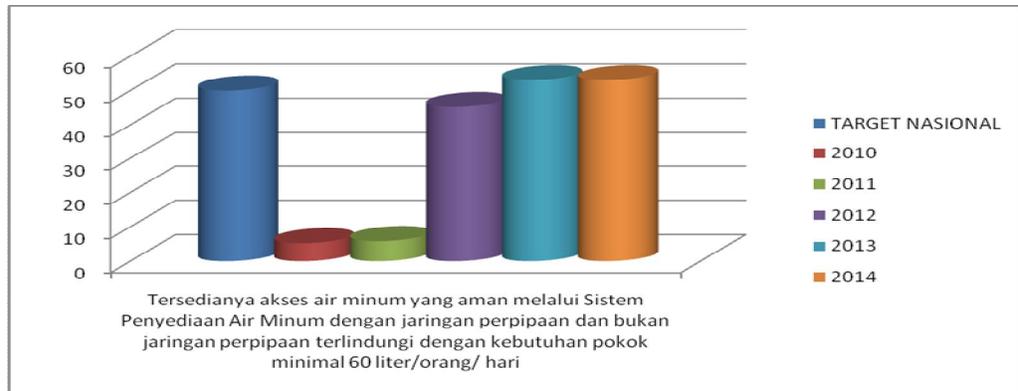
Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah semakin menurunnya kondisi debit sumber-sumber air yang mengakibatkan keterbatasan sumber air minum masyarakat, keterbatasan ketersediaan anggaran untuk membangun instalasi air bersih, semakin meningkatnya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sektor lain.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, beberapa langkah yang dilakukan yakni melaksanakan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber-sumber air, mengupayakan terobosan mencari sumber pembiayaan untuk penyediaan air bersih, pengaturan skala prioritas pemenuhan kebutuhan air untuk multi sektor.

Dalam pelaksanaannya, Jumlah anggaran yang teralokasi untuk pelaksanaan fungsi tugas terkait dengan SPM dalam tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 4.154.889.400 dan jumlah personel sebanyak 11 orang, serta apabila dikaitkan dengan

realisasi capaian SPM air minum dan kebutuhan anggaran untuk mencapai target SPM tahun 2014 maka kebutuhan anggarannya sebesar Rp. 13.681.567.000.

Berdasarkan uraian di atas, indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari (cluster pelayanan), dapat digambarkan grafik capaiannya sebagai berikut.



#### 4. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

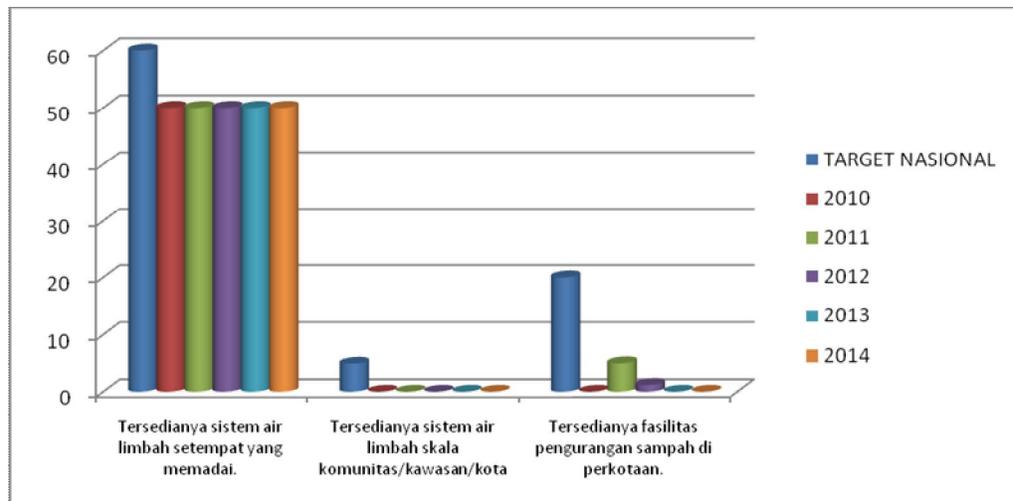
SPM bidang penyehatan lingkungan permukiman jenis layanan Air Limbah Permukiman untuk tahun 2014 untuk tersedianya sistem air limbah setempat 60 % sementara realisasi secara kumulatif dari tahun 2010 sampai pertengahan 2014 sebesar 50,00%, dengan demikian sampai dengan tahun 2014 target yang harus dicapai 10 %. Sedangkan untuk penyediaan sistem air limbah skala kawasantarget capaian 5 % sementara capaian realisasinya masih dikoordinasikan dengan instansi yang mempunyai fungsi tugas terkait dengan indikator dimaksud.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan SPM tersebut meliputi keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan untuk penyehatan lingkungan, lemahnya koordinasi antar lintas instansi yang memiliki fungsi tugas penyehatan lingkungan, kurang terintegrasinya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, kurangnya kepedulian masyarakat dalam penyediaan prasarana penyehatan lingkungan permukiman.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, beberapa langkah yang diupayakan untuk mengatasinya diantaranya adalah diupayakan terobosan mencari sumber pembiayaan untuk penyehatan lingkungan permukiman, peningkatan koordinasi dan integrasi pelaksanaan program/kegiatan antar instansi, sosialisasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana penyehatan lingkungan permukiman.

Dalam penerapannya, jumlah anggaran yang teralokasi untuk pelaksanaan fungsi tugas terkait dengan SPM dalam tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 4.154.889.400 dan jumlah personil sebanyak 11 orang sedangkan jumlah anggaran yang tersedia 2014 apabila dikaitkan dengan realisasi capaian SPM sumber penyehatan lingkungan permukiman dan kebutuhan anggaran untuk mencapai target SPM tahun 2014 maka kebutuhan anggarannya Rp. 563.000.000.

Berdasarkan uraian di atas, indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota, tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, dapat digambarkan grafik capaiannya sebagai berikut.



### 3.4. SPM BIDANG PERHUBUNGAN

#### A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perhubungan yaitu :

- a. Angkutan Jalan
  - 1) Jaringan pelayanan angkutan jalan
  - 2) Jaringan prasarana angkutan jalan
  - 3) Fasilitas perlengkapan jalan
  - 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
  - 5) Sumber Daya Manusia
  - 6) Keselamatan

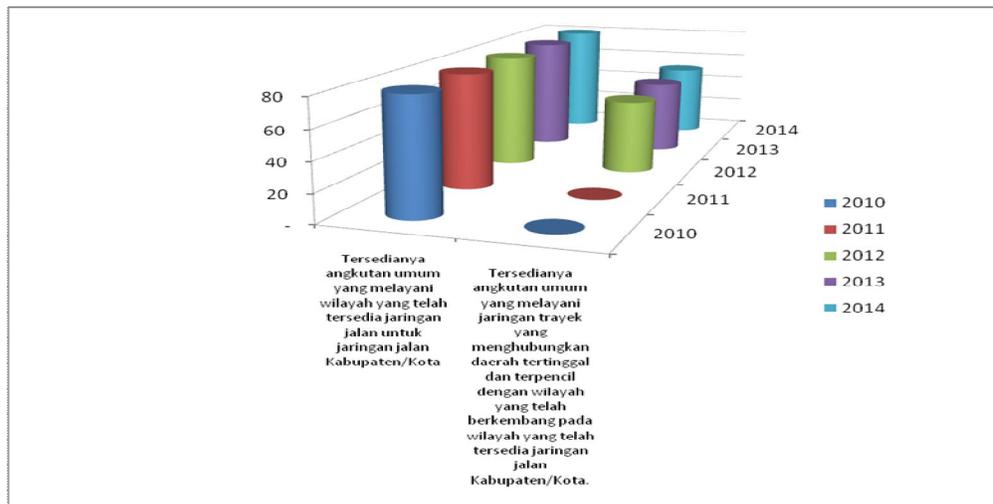
- b. Angkutan penyeberangan
  - 1) Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan
  - 2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan
  - 3) Keselamatan
  - 4) Sumber daya manusia (SDM)
- c. Angkutan laut
  - 1) Jaringan pelayanan angkutan laut
  - 2) Jaringan prasarana angkutan laut
  - 3) Keselamatan
  - 4) Sumber Daya Manusia

**B. Capaian Kinerja**

Realisasi pencapaian SPM dalam bidang urusan perhubungan tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut :

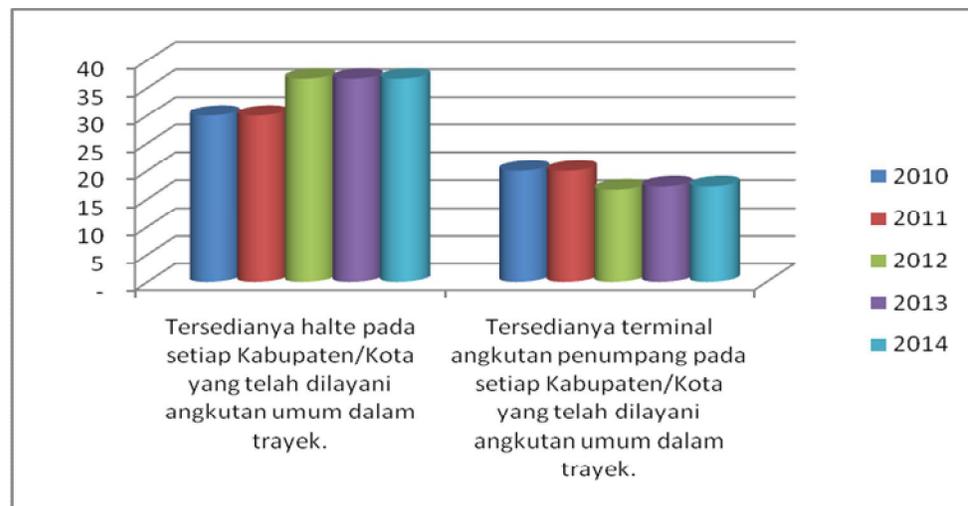
1. Indikator tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan mencapai 80 % dengan rincian yakni jaringan jalan kabupaten/kota yang telah terlayani angkutan umum sepanjang 407,69 km dari Total jaringan jalan kabupaten/ kota sepanjang 510,4 km.
2. Indikator tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil mencapai 52 %

lebih rincinya pencapaian dari masing-masing indikator dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 untuk jenis pelayanan dasar jaringan pelayanan angkutan jalan dapat dilihat pada garfik berikut.

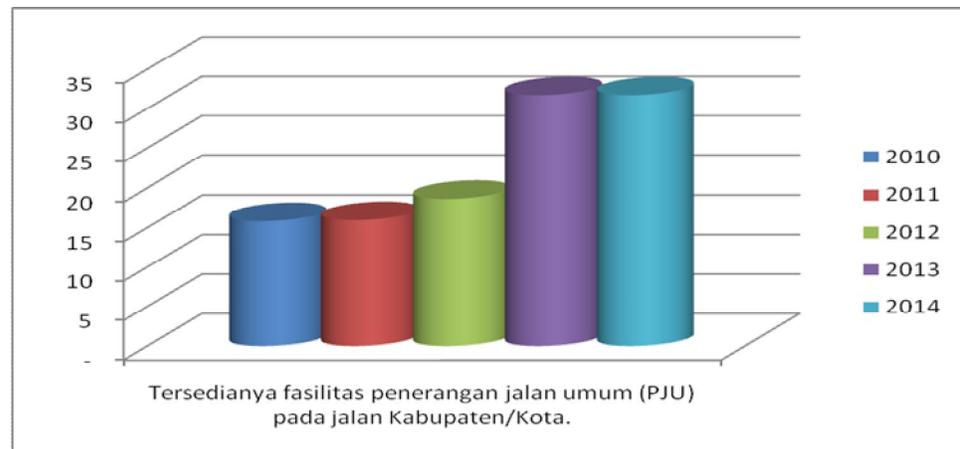


3. Indikator tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 37,93% dengan rincian yakni jumlah halte 11 unit, jalur angkutan umum 30 jalur.
4. Indikator tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 17,24% dengan rincian yakni jumlah terminal 5 unit, jumlah jalur angkutan 29 jalur.

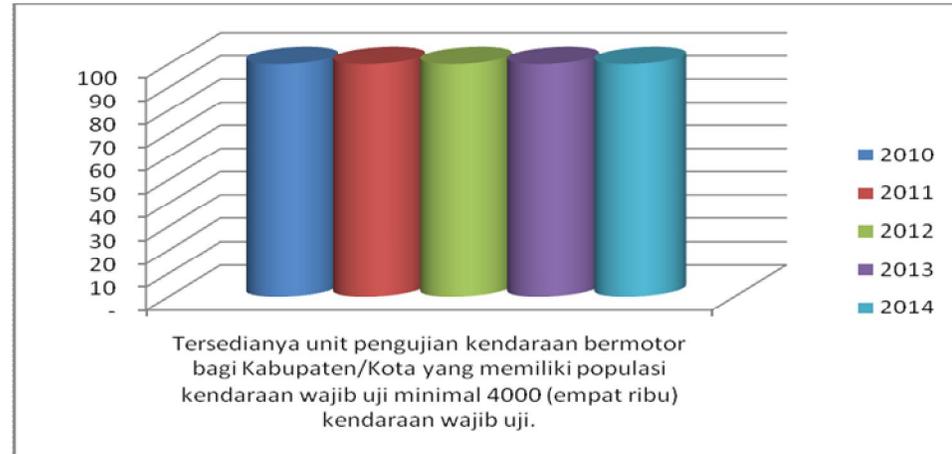
lebih rincinya pencapaian dari dua indikator tersebut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 untuk jenis pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan dapat dilihat pada garfik berikut.



5. Indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka , guardrill, dan penerangan jalan umum pada jalan Kabupaten/Kota dengan capaian 32 %. Sebagai perbandingan capaian dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

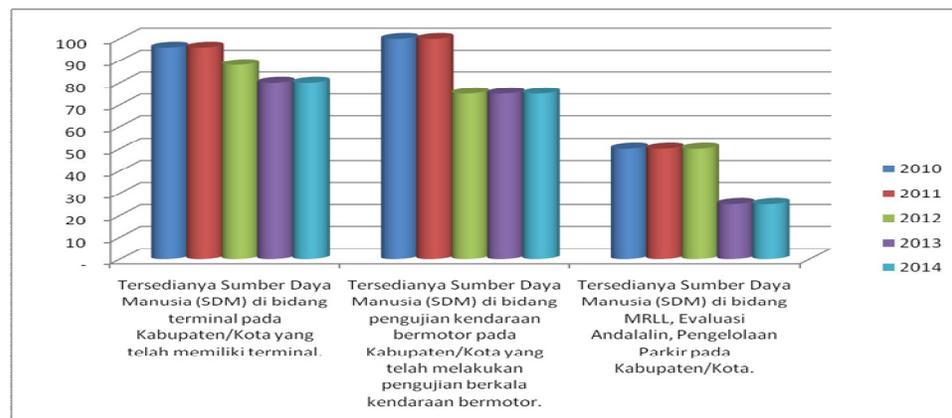


6. Indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 kendaraan wajib uji dengan jenis pelayanan dasar pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk tahun 2014 capaiannya 100 %. Sebagai perbandingan capaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.



7. Indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal dengan capaian sebesar 80 %.
8. Indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan capaian sebesar 75 %.
9. Indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 25%.

Rincian capaian dari tiga indikator di atas untuk jenis pelayanan dasar SDM, per tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

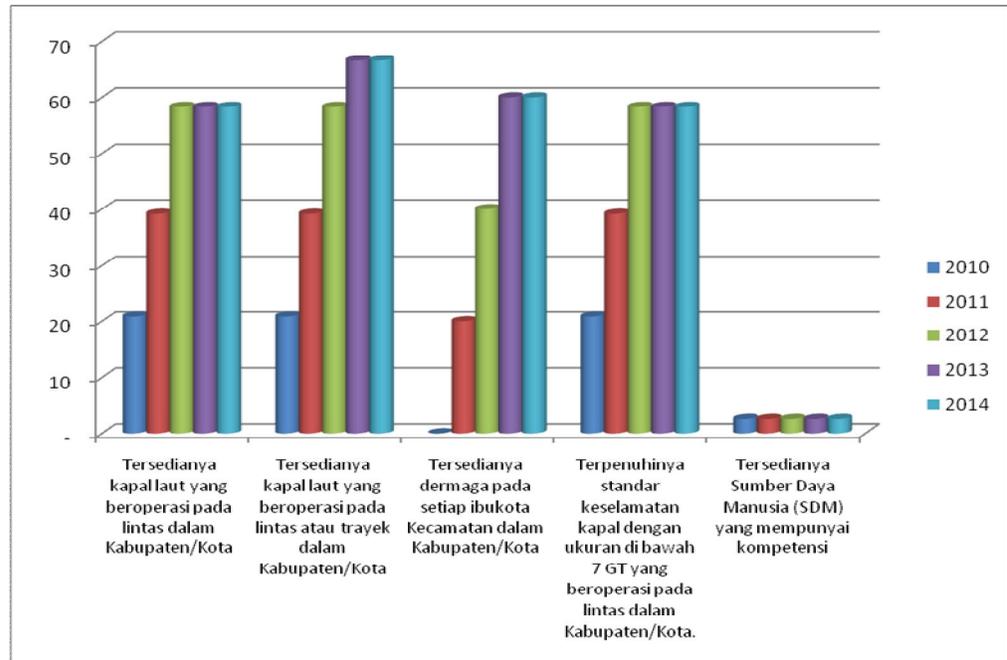


10. Indikator terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 34 %. Rincian per tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.



11. Indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan dengan capaian sebesar 58 %.
12. Indikator tersediannya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan dengan capaian sebesar 67 %.
13. Indikator tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan dengan capaian sebesar 60 %.
14. Indikator terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 58 %.
15. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT dengan capaian sebesar 3%.

Capaian dari lima indikator di atas, untuk jenis pelayanan dasar jaringan pelayanan angkutan laut, jaringan prasarana angkutan laut, keselamatan dan sumberdaya manusia, rincian capaian per tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.



### C. Permasalahan dan Solusi Bidang Perhubungan

#### Permasalahan :

- a. Kurangnya dukungan dana dari APBD Kabupaten Lombok Barat untuk membiayai penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perhubungan; dan
- b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang urusan perhubungan.
- c. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten sebagai awak kapal laut dengan ukuran di bawah 7 GT

#### Solusi :

- a. Mengajukan bantuan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dan/atau dari APBN untuk pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perhubungan; dan
- b. Mengikutsertakan personil atau pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis di bidang perhubungan.
- c. Memfasilitasi awak kapal laut untuk memperoleh SKK (Surat Keterangan Kecakapan) melalui pelatihan dengan fasilitator dari Dirjen Perhubungan Laut.

### 3.5. SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup

#### 1. Capaian SPM

Capaian SPM Kabupaten Lombok Barat Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2013 telah menetapkan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup untuk semua jenis pelayanan adalah 100%, namun hanya 2 (dua) jenis pelayanan yang nilai pencapaiannya 100% yaitu pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2014 SPM bidang lingkungan hidup menetapkan target pencapaian 100% untuk semua jenis pelayanan.

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat mulai tahun 2014 adalah sebagai berikut :

#### a. *Pelayanan Pengendalian Pencemaran Air*

Pada SPM jenis pelayanan pengendalian pencemaran air persentase realisasi pelaksanaannya hingga semester 1 (satu) tahun 2014 adalah 22,58%, hal ini disebabkan karena masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan serta instalasi pencegah pencemaran air berupa IPAL. Dari 31 usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan tahun 2014 hingga bulan Juni 2014 hanya 7 usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki IPAL sebagai taat teknis pencegah pencemaran air. Rincian usaha dan/atau kegiatan yang telah diawasi dan usaha dan/atau kegiatan yang taat administrasi teknis pencegah pencemaran air.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan dan/atau instalasi pencegah pencemaran air berupa IPAL dari hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan teguran kepada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.

*b. Pelayanan Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak*

Pada SPM jenis pelayanan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak realisasi pelaksanaannya semester 1 (satu) tahun 2014 adalah 28,57%. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis cerobong sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. Pada pengawasan yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan telah diberikan pembinaan serta teguran agar memenuhi persyaratan teknis cerobong.

Dari 30 usaha dan/atau kegiatan yang telah diawasi tahun 2014 hingga bulan Juni 2014, 7 (tujuh) yang berpotensi mencemari udara. Dari 7 (tujuh) usaha dan/atau kegiatan tersebut hanya 3 (tiga) usaha dan taua kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan sebagai persyaratan administrasi dan memiliki cerobong sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara. Rincian usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari udara terlampir (lampiran 1).

Sebagaimana pencegahan pencemaran air, usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan serta cerobong sesuai dengan yang dipersyaratkan dari hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran kepada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.

*c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa*

Pada SPM jenis pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dari luas Kabupaten Lombok Barat 105.392 Ha yang diperuntukkan untuk produksi biomassa seluas 96.115,23 Ha. Dari luas tersebut status kerusakan lahan dan/atau tanahnya adalah :

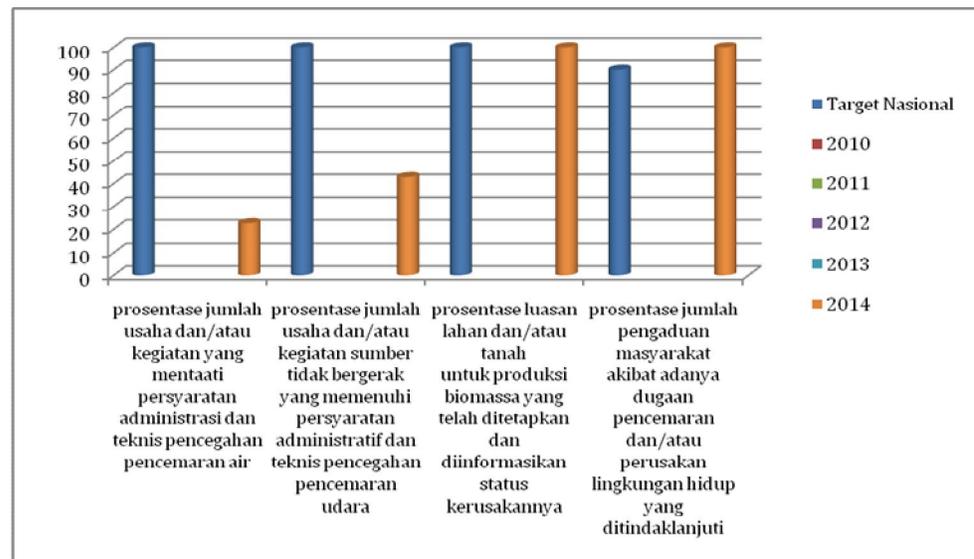
- 1) Sangat buruk (tidak produktif) : 160,07 Ha
- 2) Buruk (kurang produktif) : 9.164,93 Ha
- 3) Sedang (agak produktif) : 36.938,36 Ha
- 4) Baik (produktif) : 28.040,11 Ha

5) Sangat baik (sangat produktif) : 17.610,92 Ha

d. *Pelayanan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup*

Pada tahun 2014 jumlah pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah diterima oleh Pos Pengaduan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat adalah 6 (enam) pengaduan. Seluruh pengaduan yang diterima tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Untuk memperjelas pemaparan terkait dengan SPM bidang Lingkungan Hidup di atas, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



2. Permasalahan dan Solusi

- Dalam pelaksanaan pemeriksaan laboratorium terdapat beberapa kendala yaitu sumber daya manusia yang masih kurang, karena hanya terdapat 1 (satu) orang tenaga laboratorium. Telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut antara lain yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat agar menambahkan beberapa personil pegawai dengan kualifikasi tersebut untuk ditempatkan di UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
- Usaha dan/atau kegiatan banyak yang belum memiliki dokumen lingkungan serta persyaratan teknis lainnya terutama bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah lama berdiri. Upaya telah dilakukan oleh BLH Kabupaten Lombok Barat dengan melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, nanun karena keterbatasan anggaran, personil serta

operasional sehingga baru beberapa usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan. Pemberian sanksi berupa teguran tertulis juga telah dilakukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin dan memenuhi persyaratan teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- Pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan semua selalu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait, baik pengaduan dari masyarakat, pengusaha maupun LSM. Pengaduan yang masuk tidak hanya dari pengaduan langsung tetapi juga beberapa pengaduan melalui telpon, surat, surat kabar maupun media lainnya. Pada pelaksanaannya dindaklanjut pengaduan ini menghadapi beberapa masalah terkait dengan sarana dan prasarana seperti kendaraan yang digunakan untuk turun ke lapangan. Telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut termasuk dengan mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah.
- Dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup lainnya bisa saja terjadi dana yang dianggarkan tidak selalu bisa seluruhnya dilaksanakan karena dalam penyelesaian tidak memakai biaya tersebut misalnya biaya saksi ahli, biaya nara sumber dan biaya sidang gelar perkara, tetapi sebaliknya jika kasus yang muncul banyak dan memerlukan analisis laboratorium semua serta harus diselesaikan secara kepidanaan maka dana yang ada bisa kurang (tidak mencukupi untuk penyelesaian). Solusinya harus tersedia dana yang cukup walaupun besar untuk mengantisipasi kasus yang muncul dari pada jika ada kasus muncul tetapi pemerintah sudah tidak bisa memfasilitasi untuk penyelesaian. Lebih baik mengembalikan anggaran karena tidak terpakai dari pada tidak dapat menyelesaikan kasus yang muncul karena keterbatasan anggaran.

### 3.6. SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :

3. Pelayanan Dokumen Kependudukan, dengan indikator :
  - a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
  - b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
  - c. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran

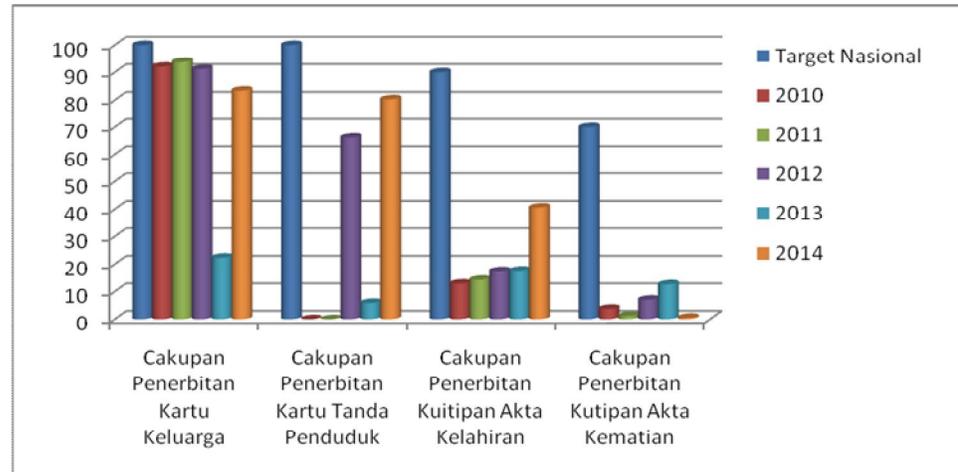
- d. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- 4. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indicator :
  - a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota
  - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
- 5. Penanggulangan Bencana Kebakaran
  - a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota
  - b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
  - c. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
  - d. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)

Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, dengan indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 92,08 %, tahun 2011 sebesar 93,79 %, tahun 2012 sebesar 91,23 %, tahun 2013 sebesar 22,36 %, dan tahun 2014 mencapai 83,43 % dengan batas waktu pencapaian 2015.
- b. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, dengan indikator Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebesar 0 %, tahun 2012 sebesar 66,20 %, tahun 2013 sebesar 5,88 %, dan tahun 2014 mencapai realisasi sebesar 80,31 % dengan batas waktu pencapaian 2015.
- c. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, dengan indikator Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 12,88 %, tahun 2011 sebesar 14,25 %, tahun 2012 sebesar 17,44 % tahun 2013 sebesar 17,63 %, dan tahun 2014 sebesar 40,59 % dengan batas waktu pencapaian 2020.
- d. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, dengan indikator Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 3,74 %, tahun 2011 sebesar 1,20 %, tahun 2012 sebesar 7,05 %, tahun

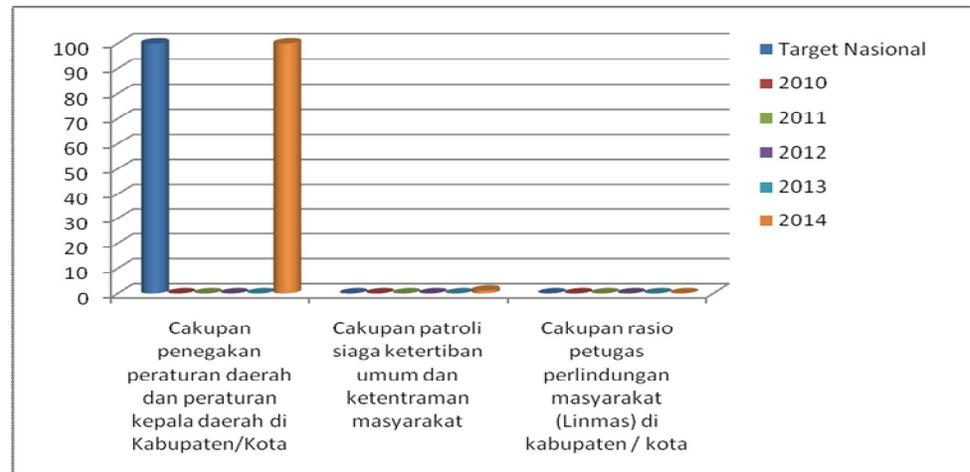
2013 sebesar 12,61 %, dan tahun 2014 sebesar 0,54 % dengan batas waktu pencapaian 2020.

Berdasarkan uraian di atas, capaian dari masing-masing indikator untuk jenis pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan dapat dilihat pada grafik berikut.



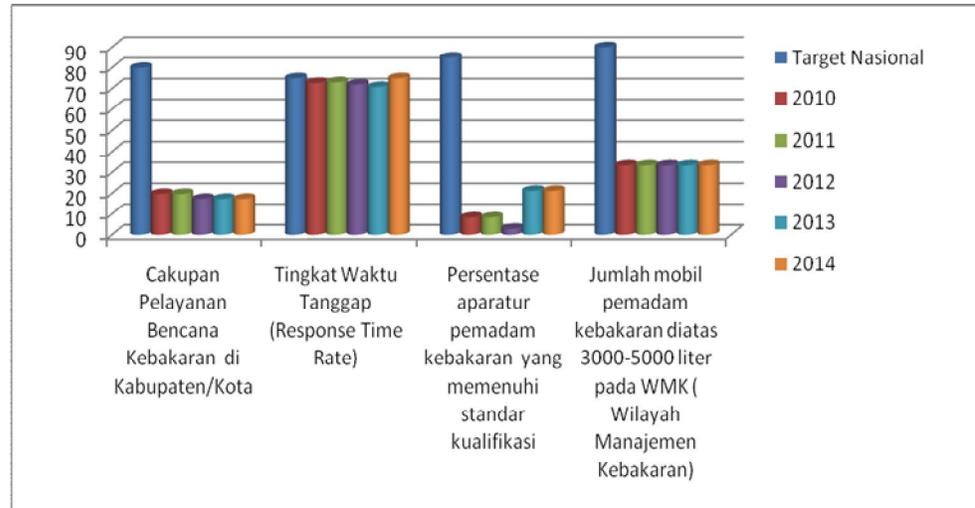
- e. Cakupan jenis pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 memperoleh realisasi sebesar 0 %, dan untuk tahun 2014 mencapai 100,00 % dengan batas waktu pencapaian 2015.
- f. Cakupan jenis pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 memperoleh realisasi sebesar 0 %, sedangkan untuk tahun 2014 realisasinya sebesar 1,10 % dengan batas waktu pencapaian 2014.
- g. Cakupan jenis pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 memperoleh realisasi sebesar 0 %, sedangkan untuk tahun 2014 realisasinya sebesar 0.03 % dengan batas waktu pencapaian 2014.

Berdasarkan uraian di atas, capaian dari masing-masing indikator untuk jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut.



- h. Cakupan jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran, dengan indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebesar 19,72 %, tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh realisasi sebesar 17,31 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.
- i. Cakupan jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran, dengan indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) untuk tahun 2010 sebesar 72,73 %, tahun 2011 sebesar 73,08 %, tahun 2012 sebesar 72,00 %, tahun 2013 sebesar 70,83 %, dan tahun 2014 sebesar 75,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.
- j. Cakupan jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran, dengan indikator Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebesar 8,33 %, tahun 2012 sebesar 2,86 %, sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 capaian realisasinya sebesar 21,21 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.
- k. Cakupan jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran, dengan indikator Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memperoleh realisasi sebesar 33,33 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas, capaian dari masing-masing indikator untuk jenis pelayanan dasar bidang penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat pada grafik berikut ini.



### 3.7. SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten/Kota, disebutkan Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Bidang KB & KS), yaitu :

- a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
- b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi:
- c. Penyediaan Informasi Data Mikro.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten dengan tujuh indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

##### 1) Cakupan PUS yang Istrinya di bawah Usia 20 Tahun

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan Pendewasan Usia Perkawinan (PUP), dimana Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun dapat meningkat jenjang ke PUS yang istrinya diatas 20 tahun sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Keberhasilan indikator ini ditunjukkan dengan semakin kecilnya realisasi.

Dalam tahun 2014 sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 % dari hasil perhitungan Jumlah PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun sebesar 7.600 dibagi jumlah PUS sebesar 141,621 dikalikan 100, maka dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013 dapat terealisasi sebesar 5.37 % (Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013).

2) Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan jumlah peserta KB Aktif dari semua metode, semakin besar realisasi semakin baik.

Untuk tahun 2014 realisasi peserta KB Aktif sebanyak 72,89 % dari target yang ada di RPJMD sebesar 72,5 % atau dicapai nilai sebesar : (termasuk katagori berhasil), (F1 PLKB/PKB/ April 2014 ).

3) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dengan alasan-alasan : hamil, Ingin Anak Segera (IAS), Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebagai sasaran menjadi peserta KB Baru.

Untuk tahun 2014 realisasi sebanyak 18,71 % dari target sebesar 15 %. Dimana Indikator ini mempunyai katagori semakin kecil realisasi semakin baik.

4) Cakupan Anggota BKB Ber KB

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berstatus PUS.

Target Tahun 2014 sebesar 70 % terealisasi sebesar 83,34 %.

5) Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber KB

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peserta KB Anggota UPPKS yang berstatus PUS.

Untuk tahun 2014 realisasi peserta KB anggota UPPKS sebesar 93,46 % dari target sebesar 95 %.

6) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Dua) Desa/Kelurahan

Indikator ini menggambarkan bahwa satu PLKB memegang binaan dua Desa/Kelurahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja PLKB dalam pencapaian Program KB sesuai dengan target dari Pusat.

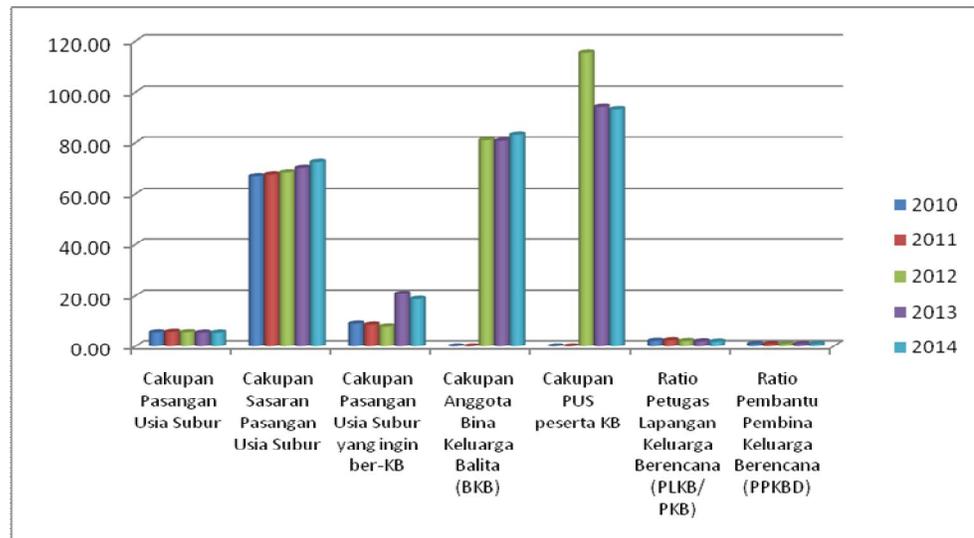
Tahun 2014 Jumlah PKB/PLKB sebanyak 61 orang, sedangkan jumlah Desa/Kelurahan se Kabupaten Lombok Barat sebanyak 122 Desa/Kelurahan sehingga realisasi capaian sebesar 1,94 %.

Indikator ini bisa tercapai 100 % apabila ada pengambilan CPNS atau Mutasi PNS dari BKD Kabupaten Lombok Barat.

7) Ratio PPKBD 1 (Satu) Petugas di Setiap Desa/Kelurahan

Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Petugas di Tingkat Desa yang membantu dalam segala hal yang berhubungan dengan Program KB. Salah satu tugas PPKBD adalah membantu PLKB dalam pemberian Peyuluhan Program KB, Pendataan Keluarga dan mencari akseptor untuk ikut program KB. Tahun 2014 jumlah PPKBD sebanyak 122 orang yang tersebar di setiap Desa/Kelurahan se Kabupaten Lombok Barat. Dengan jumlah PPKBD tersebut sudah tercapai 100 % karena di setiap desa ada satu PPKBD.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan grafik capaiannya dipadukan dengan capaian sebelumnya yakni dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, untuk jenis pelayanan dasar Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) sebagai berikut.



b. Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun, dimana realisasi capaian kinerjanya untuk tahun

2014 sebesar 33,250 (indeks hasil perhitungan (beban PEMDA), dengan rincian kebutuhan alat dan obat sebanyak 365,750, penyediaan oleh pusat (BKKBN) 332,500.

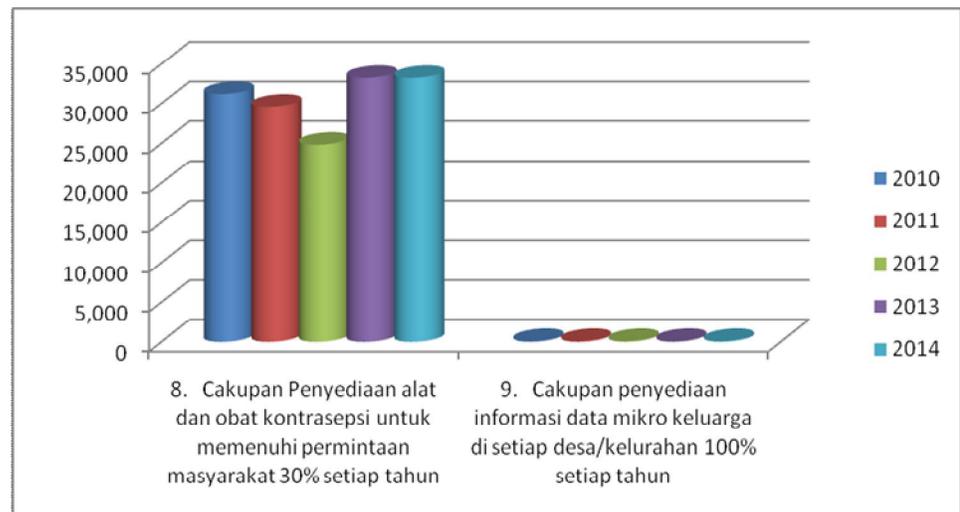
c. Penyediaan Informasi Data Mikro

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan Indikator ini tercapai 100 % karena pada tahun 2014 dengan sudah diadakannya Pendataan Keluarga selama kurun waktu 3 bulan yang dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2014.

Dari hasil pendataan keluarga dapat dihasilkan Rek.Des/R/I/KS, Rek.Kec. R/IKS dan Rek. Kab. R/I/KS. Di dalam R/I/KS sudah terhimpun berbagai data diantaranya :

- Cakupan Wilayah
- Cakupan Rumah tangga dan keluarga
- Pentahapan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Untuk jenis pelayanan dasar penyediaan alat dan obat kontrasepsi dan penyediaan informasi data mikro, dengan dua indikator di atas, dapat digambarkan grafik capaiannya yang dipadukan dengan capaian sebelumnya yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berikut ini.



2. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2014 dalam mendukung Pencapaian Target SPM Tahun 2014 sebesar Rp. 2.280.945.697, yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2014. Dana APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 yang dipergunakan untuk Belanja Langsung tersebut diatas, bersumber dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semuanya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 3. Dukungan Personil

Sebagai ujung tombak pengelola Program KB di lini lapangan terdapat Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang seluruhnya berjumlah 71 orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Kepala Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB) dan 61 ( Enam Puluh Satu ) orang fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dimana jumlah ini jauh dari cukup karena idealnya satu desa ditangani oleh seorang PKB/PLKB, sementara jumlah Desa sebanyak 122 Desa yang tersebar pada 10 Kecamatan.

Dengan demikian dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2014 jumlah keseluruhan pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat adalah 109 orang.

### 4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia menuju keluarga yang berkualitas.
- b. Tingkat kemampuan aparatur pembina dibidang teknis, manajemen, kependudukan dan keluarga berencana masih terbatas.
- c. Adanya tumpang tindih pembinaan khususnya terhadap pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan beberapa Unit Kerja/Lembaga Pemerintah.
- d. Masih terbatasnya permodalan untuk kelompok-kelompok UPPKS di lapangan dan sulitnya memperoleh tambahan dan bantuan modal dari pihak perbankan.
- e. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan khususnya yang menyangkut tingkat pendidikan, keterampilan, manajemen dan kemampuan menggerakkan penduduk dalam mengikuti program KB dan PP sehingga belum mampu memanfaatkan peluang secara maksimal .

- f. Belum termotivasinya penduduk untuk ikut program Keluarga Berencana (KB) dikarenakan doktrin religius yang ada dalam masyarakat (kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Lombok Barat).
- g. Sarana dan prasarana perlatan pelayanan KB berkualitas masih terbatas.
- h. Operasionalisasi pelayanan KB dan pemberdayaan perempuan belum menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- i. Tuntutan era global yang mengharuskan profesionalisme pada SDM dan penanganan manajemen yang efektif, efisien dan berkualitas standar Pelayanan Minimum bagi setiap SKPD.
- j. Seiring otonomi daerah dan era reformasi serta krisis ekonomi, adanya pengalihan perhatian ke sektor ekonomi dan pendidikan serta penurunan anggaran terhadap masalah KB dan PP.
- k. Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menikahkan anaknya dengan usia diatas 20 tahun.
- l. Kurangnya Personil Penyuluh KB yang idealnya 2 desa satu penyuluh.

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat tersebut di atas, kemudian dilakukan upaya solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia menuju keluarga yang berkualitas harus selalu melibatkan instansi terkait.
- 2. Memberikan kesempatan kepada aparatur pembina dibidang teknis, manajemen, kependudukan dan keluarga berencana untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
- 3. Merumuskan kegiatan yang terkoordinasi dengan unit kerja/lembaga pemerintah yang memiliki kegiatan pembinaan khususnya terhadap pemberdayaan perempuan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
- 4. Mengupayakan memfasilitasi kelompok-kelompok UPPKS yang telah maju dan berhasil untuk memperoleh tambahan dan bantuan modal dari pihak perbankan.
- 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan khususnya yang menyangkut tingkat pendidikan, keterampilan, manajemen dan kemampuan menggerakkan penduduk dalam mengikuti program KB dan PP sehingga mampu memanfaatkan peluang secara maksimal, melalui kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan maupun pendidikan dan pelatihan lainnya.

6. Meningkatkan motivasi dan merubah cara berfikir masyarakat tentang pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana (KB) menuju masyarakat yang sejahtera melalui upaya-upaya pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan pelayanan KB yang lebih berkualitas.
8. Meningkatkan jangkauan pelayanan KB dan pemberdayaan perempuan ke seluruh Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
9. Tuntutan era global yang mengharuskan profesionalisme pada SDM dan penanganan manajemen yang efektif, efisien dan berkualitas standar Pelayanan Minimum bagi setiap SKPD.
10. Memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan bahwa krisis ekonomi tidak hanya disebabkan oleh sektor ekonomi dan pendidikan tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk sehingga perlu perhatian yang serius terhadap masalah KB dan PP.

3.8. SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah :

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Capaian kinerja pada Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut :

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu :  
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2014 termasuk kategori sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% dari target capaian daerah sebesar 90 %.
2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit :  
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2014 sudah terealisasi sebesar 100% dari target capaian daerah sebesar 80 %, dengan tertanganinya 101 korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas/RS mampu tatalaksana KtP/A.
3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu :  
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2014, baru terealisasi sebesar 100 % dari target capaian daerah sebesar 60 %, dengan tertanganinya 11 orang korban yang telah mendapatkan layanan rehabsos/konseling oleh psikolog PPT masing-masing sebanyak 1 kali, dari 47 korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos. Adapun rincian 47 orang tersebut berdasarkan jenis kasus : KDRT sebanyak 17 korban, Perkosaan sebanyak 23 korban dan Pencabulan sebanyak 7 korban. 47 korban tersebut sangat membutuhkan rehabilitasi sosial dalam bentuk motivasi, diagnosis dan konseling.
4. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :  
Di tahun 2014 cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baru mencapai realisasi sebesar 5,5% dari target capaian daerah sebesar 50%, dengan volume :  
Dari 18 orang korban yang disidangkan hanya 1 orang korban yang

mendapatkan putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini dikarenakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bersifat delik aduan dan pencabutan perkara oleh pelapor.

5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum :

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, terealisasi sebesar 100% dari target capaian daerah sebesar 50% dengan volume :

Bantuan hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender terdiri dari jenis layanan :

- Pemeriksaan Perkara oleh Pendamping : 75 korban Hukum (UPPA Polres)
- Pendampingan Hukum oleh Pendamping : 18 korban Hukum (UPPA Polres dan LPBH NU)

6. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan :

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan telah terealisasi sebesar 100% dari target capaian daerah sebesar 90% dengan volume :

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak telah berhasil memfasilitasi korban kekerasan untuk disatukan kembali ke keluarganya/lingkungan masyarakatnya sebanyak 22 korban.

2. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2014 dalam mendukung Pencapaian Target SPM Tahun 2014 sebesar Rp. 190.100.000,00, yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2014, dengan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

3. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berjumlah 22 orang.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang keberadaan dan penanganan korban kekerasan
- b. Minimnya dukungan pemerintah baik anggaran dan fasilitas operasional lainnya
- c. Sulitnya penjangkauan kepada korban karena lokasi kasus yang berjauhan dan kurangnya fasilitas operasional
- d. Kurang optimalnya kerjasama tim pelaksana harian

Solusi :

- a. Memberikan pemahaman melalui Rapat Koordinasi kepada Instansi pemerintah
- b. Mengadakan sosialisasi baik media massa maupun media elektronik
- c. Menggalang dukungan dana, baik pemerintah maupun non pemerintah/swasta
- d. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Puskesmas, Polsek, TOMA) dalam upaya pencegahan dan penanganan korban
- e. Mengadakan rapat kordinasi secara rutin misalnya setiap bulan atau bila diperlukan
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi sesama tim pelaksana harian.

### 3.9. SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

Realisasi pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pada jenis pelayanan dasar Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan untuk tahun 2014 secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) sector/bidang usaha per tahun, dan pada tahun 2014 telah melampaui dan memenuhi target yaitu sebanyak 2 sektor yaitu sector pariwisata dan pertambangan.
2. Pelayanan dasar untuk kerjasama penanaman modal dengan indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan tahun 2014 sebanyak 1 kali artinya pencapaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan.
3. Pelayanan dasar untuk promosi penanaman modal dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi/kabupaten/kota dengan target secara nasional sebanyak 1 kali per

tahun dan target tahun 2014 sudah bisa dilaksanakan sehingga target dan realisasi untuk tahun 2014 sudah tercapai 100 %.

4. Pelayanan dasar untuk pelayanan penanaman modal dengan indikator Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal, target SPM daerah untuk tahun 2014 sebesar 100 % dan realisasi telah mencapai 100 %.
5. Pelayanan dasar untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun untuk tahun 2014 realisasinya sebanyak 2 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 1 kali untuk tahun 2014.
6. Pelayanan dasar untuk pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dimana target tahun 2014 belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana sehingga capaian masih 0 %.
7. Pelayanan dasar untuk Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, untuk realisasinya tahun 2014 sebanyak 2 kali.

### 3.10. SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar SPM terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Nasional
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Capain SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk jenis pelayanan dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional dengan indikator Media Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio dan televise untuk tahun 2014

tidak terealisasi yakni 0 %, melalui media baru seperti website (media online) dimana untuk tahun 2014 realisasinya 100 %, melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, dan lokakarya untuk tahun 2014 realisasinya sebesar 25 %, serta melalui media luar ruangan seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho untuk tahun 2014 realisasinya mencapai 100 %.

2. Untuk jenis pelayanan dasar Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan untuk tahun 2014 realisasinya mencapai 100 %, karena dimasing-masing kecamatan sudah terdapat kelompok informasi masyarakat (KIM)

b. Alokasi Anggaran

Jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di bidang urusan komunikasi dan informatika oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2014 bersumber dari APBD. Adapun jumlah dukungan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional :

- a. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya.  
Sebanyak Rp.76.432.500
- b. Media Luar ruangan
  - baliho, leaflet, poster Rp. 18.320.000
  - Pemutaran Film Rp. 9.596.400
  - Running Text Rp. 116.380.000
  - Siaran Keliling (Colling) Rp. 14.410.000

2. Alokasi anggaran untuk Pengembangan dan Pemberdayaan KIM sebesar Rp.12.375.000

c. Permasalahan dan Solusi Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan :

- a. Kurangnya dukungan dana dari APBD Kabupaten Lombok Barat untuk membiayai penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan komunikasi dan informatika ; dan
- b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang urusan komunikasi dan informatika.

Solusi :

- a. Mengajukan bantuan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dan/atau dari APBN untuk pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan komunikasi dan informatika; dan
- b. Mengikutsertakan personil atau pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis di bidang komunikasi dan informatika.

### 3.11. SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

#### a. Jenis Layanan Dasar

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan.

Tujuan penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk :

1. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
3. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal;
4. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan 4 jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan, yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2. Distribusi dan Akses Pangan;
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
4. Penanganan Kerawanan Pangan;

#### b. Capaian SPM

##### 1. Indikator Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita

Pada semester I tahun 2014 realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator ketersediaan energi dan protein per kapita menggunakan data semester II tahun 2013. Sehingga capaian tahun 2013 sama dengan semester I tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan adalah data ATAP (asumsi tetap) dari Dinas Pertanian yang keluar setiap pertengahan tahun  $n+1$ , maka dari itu data yang ada yaitu ATAP 2013. Sedangkan untuk data jumlah penduduk pertengahan tahun dari BPS juga masih menggunakan data tahun 2013.

Tabel 11.1  
Realisasi Target Capaian SPM Semester I Tahun 2014  
Indikator Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita

Indikator SPM	2012		2013		2014		2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	60,00	1208,08	70,00	98,99	80,00	98,99	90,00

Realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita adalah 98,99 % sedangkan untuk target daerah 80 % sehingga realisasi capaian daerah lebih tinggi daripada target yang ditetapkan.

## 2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan yang dimaksud adalah cadangan pangan milik pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dari tahun 2007, 2008 dan 2009 waktu itu Bidang Ketahanan Pangan (sekarang KKPD) di BP4KKPD (sekarang Bapeluh) Kabupaten Lombok Barat mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 75.000.000 atau 14.545 kg beras untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan dari tahun 2007 s/d 2009. Beras tersebut disimpan di UD. Jaya Perdana sebanyak 10.000 kg dan di UD. Mutiara Indah sebanyak 4.545 kg. Kondisi pada tahun 2012 stok cadangan pangan yang disimpan di UD. Jaya Perdana sudah habis digunakan untuk penanganan rawan pangan pasca bencana sedangkan stok di UD. Mutiara Indah sebanyak 2.870 kg. Tahun 2013 stok beras masih tersimpan 620 kg. Dan tahun 2014 stok 620 kg tersebut habis untuk penanganan rawan pangan bencana banjir di Desa Kuripan.

Pada semester I tahun 2014 realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator penguatan cadangan pangan adalah 0 % sedangkan untuk target daerah 55 %. Hal tersebut stok cadangan pangan sudah habis digunakan untuk menangani kerawanan pangan pasca bencana (kerawanan pangan transient). Sebenarnya untuk tahun 2014 pengisian stok cadangan pangan di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah dianggarkan melalui APBD II sebanyak 20 ton dan saat ini dokumen pencairannya sedang dalam proses di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 11.2  
Realisasi Target Capaian SPM Semester I Tahun 2014  
Indikator Penguatan Cadangan Pangan

Indikator SPM	2012		2013		2014		2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
2 Penguatan Cadangan Pangan	40,00	2,87	50,00	0,62	55,00	0,00	60,00

3. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga Dan Akses Pangan Di Daerah  
 Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan harga data pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin oleh kabupaten. Data dan informasi mencakup komoditas : beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/tahunan. Pencatatan dilakukan selama 48 minggu. Lokasi pengamatan dilakukan di Pasar Gerung yang merupakan pasar induk Kabupaten Lombok Barat, Pasar Narmada dan Pasar Gunungsari. Namun untuk pasokan dan akses hanya dilakukan di Pasar Gerung.

Tabel 11.3  
 Realisasi Target Capaian SPM Semester I Tahun 2014  
 Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga Dan Akses Pangan

Indikator SPM	2012		2013		2014		2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
3 Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses	72,50	98,29	75,00	98,29	80,00	98,29	90,00

Pada semester I tahun 2014 realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah adalah 98,29 % sedangkan untuk target daerah 80,00 %.

4. Indikator Stabilitas Harga Dan Pasokan Pangan

Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal dan pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5%-40%. Harga yang dipantau adalah komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah.

Tabel 11.4  
 Realisasi Target Capaian SPM Semester I Tahun 2014  
 Indikator Stabilitas Harga Dan Pasokan Pangan

Indikator SPM	2012		2013		2014		2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	72,50	100	75,00	100	80,00	100,00	90,00

Pada semester I tahun 2014 realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator stabilitas harga dan pasokan pangan adalah 100 % sedangkan untuk target daerah 80,00 % sehingga realisasi capaian daerah lebih tinggi daripada target yang ditetapkan.

5. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, dan seimbang.

Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) rata-rata per kapita per hari untuk energi 2000 kkal dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keberagaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Pada semester I tahun 2014 realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator skor pola pangan harapan menggunakan data semester II tahun 2013. Sehingga capaian tahun 2013 sama dengan semester I tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah survey untuk responden skor PPH yang meliputi 270 KK yang diambil dari 9 kecamatan terbagi dalam 3 wilayah (3 kecamatan untuk wilayah agro ekologi pertanian, 3 kecamatan untuk wilayah industri, dan 3 kecamatan lagi untuk perikanan). Disamping itu faktor pengolahan data dari hasil survey responden menjadi skor PPH membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Tabel 11.5  
Realisasi Target Capaian SPM Semester I Tahun 2014  
Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator SPM	2012		2013		2014		2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	60,00	61,7	70,00	69,2	80,00	69,20	90,00

Pada semester I tahun 2014 realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator skor pola pangan harapan (PPH) adalah 69,20 % sedangkan untuk target daerah 80,00 %.

6. Indikator Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berupa pengujian sampel pangan segar sebanyak 5 buah (3 sampel buah segar dan 2 sampel sayur segar). Pada Semester I Tahun 2014 realisasi capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk jenis indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah 0 %. Sebenarnya untuk tahun 2014 pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Lombok Barat sudah dianggarkan melalui APBD II Perubahan sehingga kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan setelah APBD II Perubahan disahkan.

Tabel 11.6  
Realisasi Target Capaian SPM Semester I Tahun 2014  
Indikator Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Indikator SPM	2012		2013		2014		2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	40,00	100,00	50,00	0,00	60,00	0,00	80,00

#### 7. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan Rawan pangan terbagi menjadi dua pengertian : (1) Rawan pangan kronis yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan, (2) Rawan pangan transien yaitu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti bencana alam.

Pencegahan rawan pangan melalui 3 (tiga) pendekatan :

- a. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- b. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat desa
- c. Perhitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria % AKG sebesar 2000 kal, yaitu :

Penduduk sangat rawan : < 70% AKG

Penduduk pangan resiko sedang: 70% - 89,9% AKG

Penduduk tahan pangan : > 89,9% AKG

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang penyusunan laporan SPM yang diadakan oleh BKP Provinsi NTB dengan SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan se-NTB, disepakati untuk indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui pendekatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Berdasarkan data SKPG tahunan, Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari 10 kecamatan berstatus rawan pangan (warna merah). Setiap bulan 10 kecamatan tersebut selalu dipantau atau ditangani dengan SKPG bulanan.

Tabel 11.7  
Realisasi Target Capaian SPM Semester I Tahun 2014  
Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

Indikator SPM	2012		2013		2014		2015
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
7 Penanganan Daerah Rawan Pangan	50,00	100,00	50,00	100,00	60,00	100,00	60,00

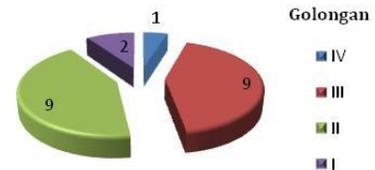
Indikator penanganan daerah rawan pangan berupa pemantauan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) pada 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Pada semester I tahun 2014 realisasi capaian SPM bidang ketahanan pangan untuk jenis indikator penanganan daerah rawan pangan adalah 100 % sedangkan untuk target daerah 60,00 %.

### C. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan Kabupaten Lombok Barat pada semester I tahun 2014.

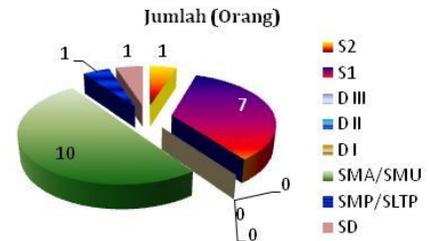
Tabel 11.1  
Jumlah Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Daerah (PNS)  
Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	1
2	III	9
3	II	9
4	I	2
TOTAL		20



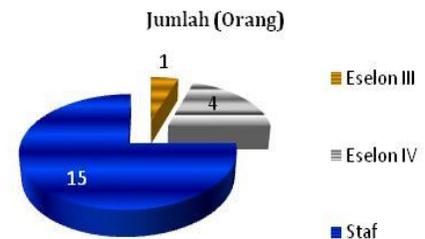
Tabel 11.2  
Jumlah Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Daerah (PNS)  
Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	1
2	S1	7
3	D III	-
4	D II	-
5	D I	-
6	SMA/SMU	10
7	SMP/SLTP	1
8	SD	1
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>



Tabel 11.3  
Jumlah Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Daerah (PNS)  
Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	4
3	Staf	15
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>



#### D. Permasalahan dan Solusi

1. Dalam pelaksanaan perhitungan ketersediaan energi dan protein per kapita tidak ada permasalahan yang berarti. Ada beberapa data yang sulit untuk didapatkan dari instansi terkait untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan.
2. Indikator penguatan cadangan pangan daerah semester I tahun 2014 sudah dianggarkan sebanyak 20 ton yang saat ini dokumen pencairannya sedang diproses di bagian keuangan Setda Kab. Lobar.
3. Permasalahan dalam indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah yaitu minimnya anggaran yang ada. Maka dari itu pencatatan harga komoditi hanya bisa dilakukan pada pasar induk Kabupaten (Pasar Gerung) dan beberapa pasar kecamatan yaitu Pasar Narmada dan Pasar Gunugsari.
4. Untuk indikator stabilitas harga dan pasokan pangan, permasalahannya hampir sama dengan indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Minimnya anggaran yang ada.

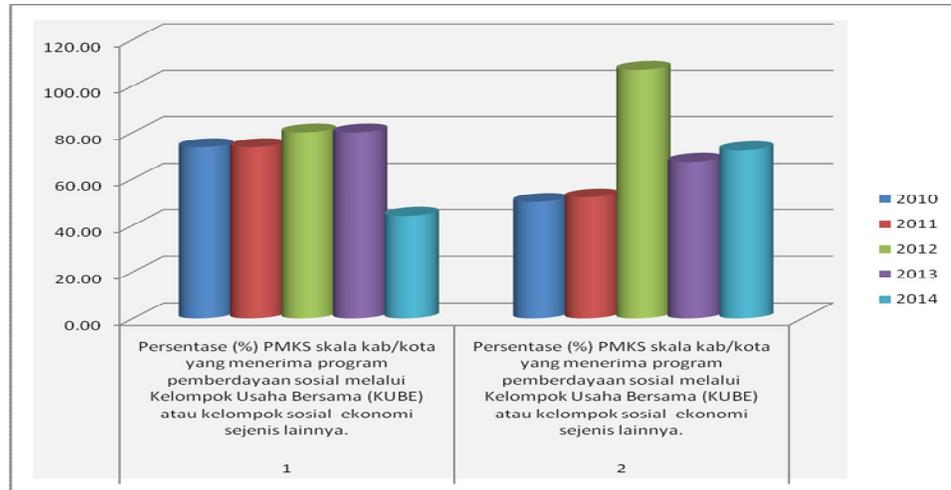
5. Untuk indikator pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), permasalahan yang ada yaitu sulitnya mengubah kebiasaan pola makan masyarakat khususnya Kabupaten Lombok Barat dalam membudayakan pola konsumsi yang beragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup.
6. Untuk indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan setelah APBDP kab. Lobar disahkan atau pada pelaporan SPM semester II.
7. Sampai dengan saat ini Kantor Ketahanan Pangan Daerah selaku SKPD yang menangani bidang ketahanan pangan belum mempunyai peta kerawanan pangan tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Hal tersebut berkaitan dengan minimnya anggaran Kantor Ketahanan Pangan Daerah. Selama ini pengawasan daerah rawan pangan dilakukan melalui SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi).

### 3.12. SPM BIDANG SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 80/HUK/2010, dapat dijabarkan capaian kinerja SPM Bidang Sosial sebagai berikut.

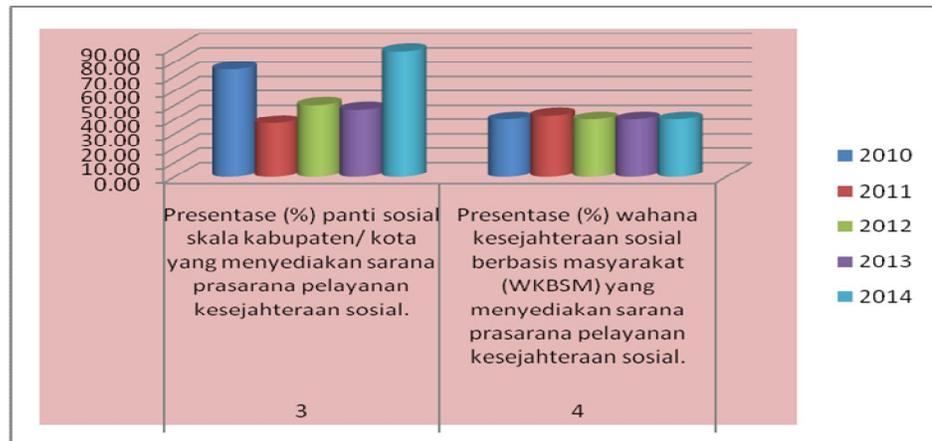
1. Pelayanan Dasar untuk Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten dengan indikator Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 capaian realisasinya sebesar 73,57 %, tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 capaiannya sebesar 79,99 %, dan tahun 2014 sebesar 44,09 % dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.
2. Pelayanan Dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten dengan indikator Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, untuk tahun 2010 capaian kinerjanya sebesar 50,00 %, tahun 2011 sebesar 51,95 %, tahun 2012 sebesar 106,98 %, tahun 2013 sebesar 67,38 %, sedangkan untuk tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 72,22 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas, capaian kinerja untuk jenis pelayanan dasar pelaksanaan kegiatan bidang sosial per tahun capaiannya dapat dilihat pada grafik berikut.



3. Pelayanan Dasar untuk penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten dengan indikator Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, untuk tahun 2010 sebesar 75,00 %, tahun 2011 sebesar 37,50 %, tahun 2012 sebesar 50,00 %, tahun 2013 sebesar 46,88 %, sedangkan untuk tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 87,50 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.
4. Pelayanan Dasar untuk penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial skala kabupaten dengan indikator Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, untuk tahun 2010 capaian kinerjanya sebesar 40,00 %, tahun 2011 sebesar 42,86 %, sedangkan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 40,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.

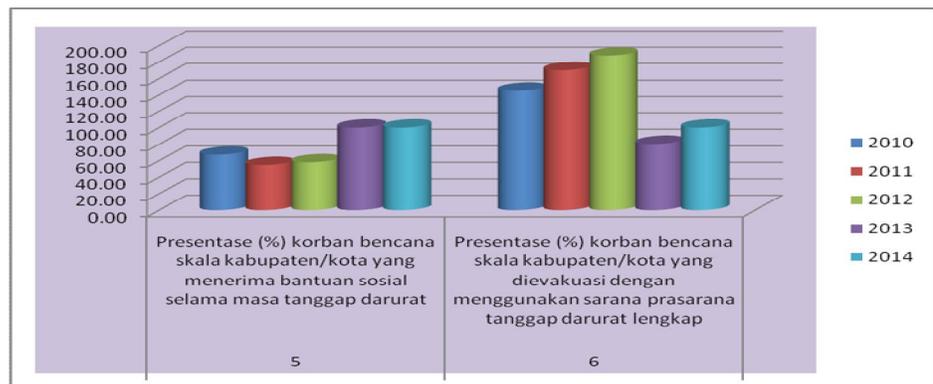
Berdasarkan uraian diatas, capaian kinerja untuk jenis pelayanan dasar penyediaan sarana dan prasarana sosial per tahun capaiannya dapat dilihat pada grafik berikut.



5. Pelayanan Dasar bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten dengan indikator Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, untuk tahun 2010 sebesar 67,48 %, tahun 2011 sebesar 54,80 %, tahun 2012 sebesar 58,16 %, sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.

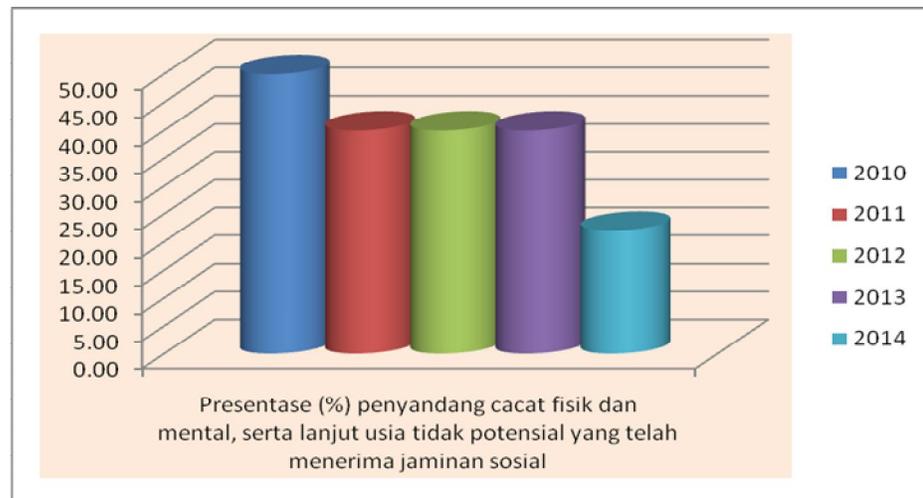
6. Pelayanan Dasar untuk evakuasi korban bencana skala kabupaten dengan indikator Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, untuk tahun 2010 sebesar 145,41 %, tahun 2011 sebesar 170,02 %, tahun 2012 sebesar 187,92 %, tahun 2013 sebesar 80,54 %, sedangkan untuk tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.

capaian kinerja untuk jenis pelayanan dasar penanggulangan korban bencana secara rinci capaiannya dapat dilihat pada grafik berikut.



7. Pelayanan Dasar untuk Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota, dengan indikator Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, untuk tahun 2010 capaiannya sebesar 49,97 %, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebesar 39,98 %, sedangkan tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 21,98 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2015.

capaian kinerja untuk jenis pelayanan dasar pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial secara rinci capaiannya dapat dilihat pada grafik berikut.



### 3.13. SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

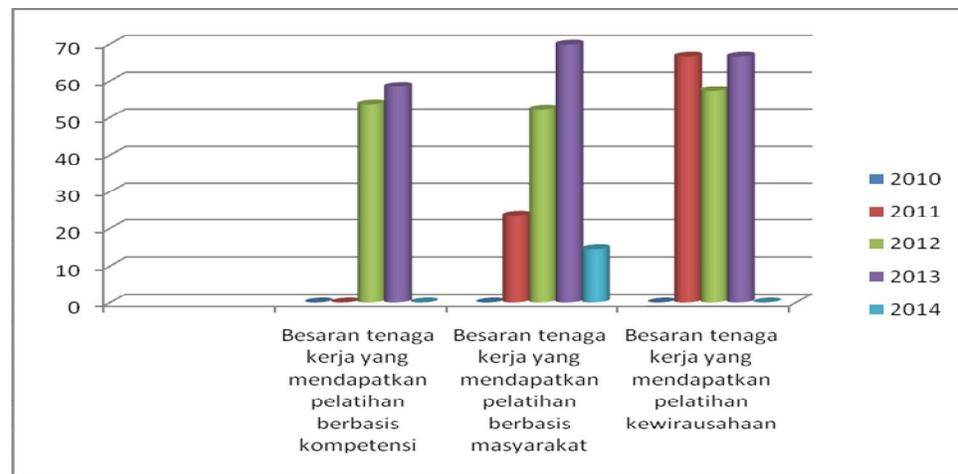
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 15/MEN/X/2010, dapat dijabarkan capaian kinerja SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut.

1. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Pelatihan Kerja dengan indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 realisasinya sebesar 0 %, tahun 2012 sebesar 53,57 %, tahun 2013 sebesar 58,39 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 0 %, dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.
2. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Pelatihan Kerja dengan indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 0 %, tahun 2011 realisasinya sebesar 23,52 %, tahun 2012

sebesar 52,17 %, tahun 2013 sebesar 69,84 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 14,29 %, dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.

3. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Pelatihan Kerja dengan indikator besaran Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 0 %, tahun 2011 realisasinya sebesar 66,66 %, tahun 2012 sebesar 57,14 %, tahun 2013 sebesar 66,66 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 0 %, dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.

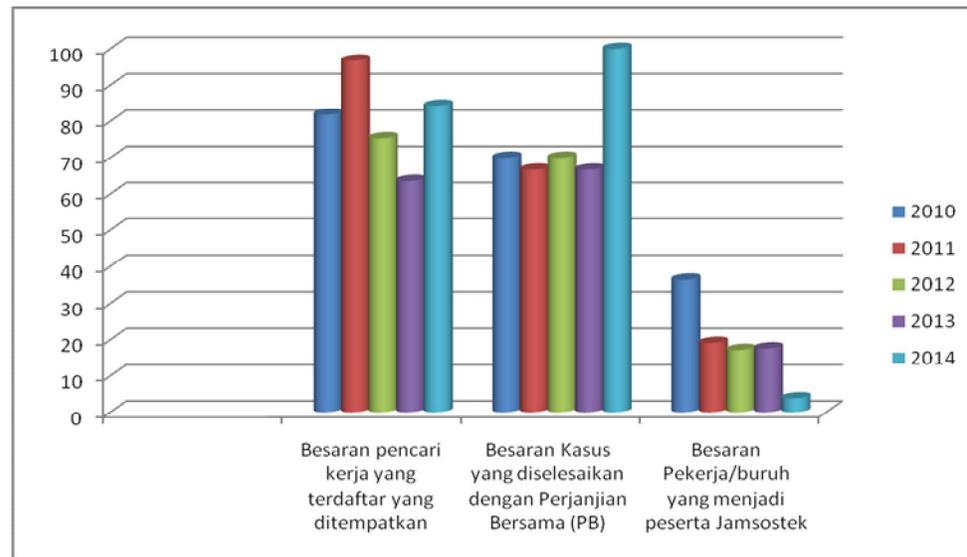
Capaian kinerja untuk jenis pelayanan dasar pelayanan pelatihan kerja secara rinci per tahun capaiannya dapat dilihat pada grafik berikut.



4. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 81,79 %, tahun 2011 realisasinya sebesar 96,76 %, tahun 2012 sebesar 75,37 %, tahun 2013 sebesar 63,57 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 84,34 %, dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.
5. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 70,00 %, tahun 2011 realisasinya sebesar 66,66 %, tahun 2012 sebesar 70,00 %, untuk tahun 2013 sebesar 66,67 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 100,00 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.
6. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Kepesertaan Jamsostek dengan indikator Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 36,38 %, tahun 2011 realisasinya sebesar 19,14 %, tahun

2012 sebesar 17,19 %, tahun 2013 sebesar 17,63 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 3,84 %, dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.

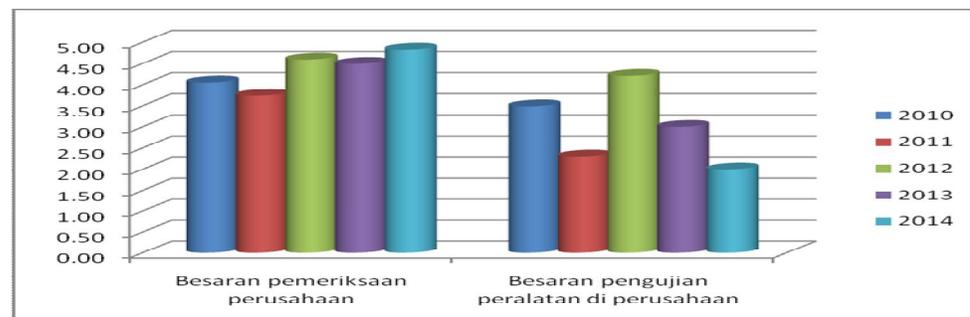
Capaian kinerja untuk tiga indikator di atas, secara rinci per tahun capaiannya dapat dilihat pada grafik berikut.



7. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan indikator Besaran pemeriksaan perusahaan untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 4,05 %, tahun 2011 realisasinya sebesar 3,74 %, tahun 2012 sebesar 4,59 %, tahun 2013 sebesar 4,49 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 4,83 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.

8. Jenis pelayanan dasar Pelayanan Kepesertaan Jamsostek dengan indikator Besaran pengujian peralatan di perusahaan untuk tahun 2010 realisasinya sebesar 3,48 %, tahun 2011 realisasinya sebesar 2,29 %, tahun 2012 sebesar 4,21 %, tahun 2013 sebesar 3,00 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 2,00 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2016.

Capaian kinerja untuk dua indikator di atas, secara rinci per tahun capaiannya dapat dilihat pada grafik berikut.



### 3.14. SPM BIDANG KESENIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten/Kota, maka dapat dijabarkan capaian kinerja pada SPM Bidang Kesenian sebagai berikut.

1. Pelayanan Dasar untuk Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian dengan indikator Cakupan Kajian Seni (50%), untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 capaian realisasinya sebesar 80,00 %, tahun 2013 sebesar 120,00 % sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 147,00 % dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014.
2. Pelayanan Dasar untuk Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian dengan indikator Cakupan Fasilitasi Seni (30%), untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 capaian realisasinya sebesar 95,00 %, tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebesar 143,00 %, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 190,00 % dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014.
3. Pelayanan Dasar untuk Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian dengan indikator Cakupan Gelar Seni (75%), untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian realisasinya sebesar 100,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014.
4. Pelayanan Dasar untuk Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian dengan indikator Misi Kesenian (100%), untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian realisasinya sebesar 100,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014.
5. Pelayanan Dasar untuk Sarana dan Prasarana dengan indikator Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%), untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian realisasinya sebesar 150,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014.
6. Pelayanan Dasar untuk Sarana dan Prasarana dengan indikator Cakupan Tempat (100%), untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian realisasinya sebesar 100,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014.
7. Pelayanan Dasar untuk Sarana dan Prasarana dengan indikator Cakupan Organisasi, untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 realisasinya sebesar 196,00 % sedangkan untuk tahun 2014 capaian realisasinya sebesar 100,00 %, dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014.

## BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 4.1. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan tentang laporan penerapan dan pencapaian SPM dari masing-masing bidang urusan khususnya di Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa permasalahan secara umum yakni antara lain keterbatasan sumberdaya manusia dalam proses pencapaian kegiatan, anggaran penunjang dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, serta kurangnya pemahaman unit kerja terkait tentang SPM tersebut.

### 4.2. SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah dijabarkan pada permasalahan di atas, maka berikut ini disampaikan beberapa solusi yang digunakan dalam pemecahan masalah tersebut sebagai berikut.

- a. Dalam proses penerapan dan pencapaian SPM khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang berkaitan dengan kurangnya sumberdaya manusia yang menangani bidang SPM tersebut, maka dalam hal ini diharapkan SKPD terkait berkoordinasi langsung dengan BKD Kabupaten Lombok Barat yang menangani bidang kepegawaian.
- b. Permasalahan yang bersifat finansial atau anggaran yang menunjang proses pencapaian SPM saat ini hendaknya dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan yang ada dengan berdasarkan *need assesment* (analisis kebutuhan), sehingga kedepannya mudah-mudahan anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM ini bisa dijadikan *baseline* (data dasar) perencanaan anggaran masing-masing SKPD.
- c. Permasalahan yang terjadi, terkait pada pemahaman SKPD tentang SPM itu sendiri, maka dalam hal ini diharapkan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat dalam hal asistensi terkait SPM tersebut. .

BAB V  
PENUTUP

Berdasarkan paparan pada Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal terkait penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. SPM bidang kesehatan, rata-rata pencapaian indikator SPM pada jenis Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 66,67 %, Jenis Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar 50,79 % dan Jenis Pelayanan Promosi cakupan desa siaga aktif sebesar 100 %. Sedangkan pada jenis pelayanan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB sebesar 0 % karena tidak ada Kejadian Luar Biasa (KLB).
2. SPM Bidang Pekerjaan Umum dengan jenis pelayanan Sumber daya Air rata-rata mencapai 38,70 %, Jalan 81,57 %, Air Minum 53,04 %, Penyehatan Lingkungan Permukiman 50 %, dan Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan 0 %.
3. SPM Bidang Perhubungan rata-rata pencapaian SPM pada 3 jenis pelayanan dasar, Angkutan jalan sebesar 47,96 %, Angkutan laut sebesar 49,17 %.
4. SPM bidang Lingkungan Hidup, pada jenis pelayanan pencegahan pencemaran air persentase realisasi belum mencapai 100 % hingga akhir pelaksanaan tahun 2013, hal ini disebabkan karena the Sentosa Hotel dan Resort belum memiliki IPAL.
5. SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan jenis pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan dengan rata-rata capaian indikator sebesar 51,22 %, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar 33,71 % dan penanggulangan bencana kebakaran sebesar 36,71 %.
6. SPM Bidang keluarga berencana rata-rata pencapaian SPM pada 3 jenis pelayanan dasar, Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) sebesar 39,53 %, Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi sebesar 33,25 %, dan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi sebesar 100 %.
7. SPM Bidang Penanaman Modal dari 7 (tujuh) jenis pelayanan dasar yakni terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten dan terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu realisasinya sebesar 100 %, sedangkan sisanya belum dapat terealisasi sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.
8. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika rata-rata pencapaian SPM pada 2 jenis pelayanan dasar, Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional sebesar 80 %, Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebesar 100 %.

9. SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah dengan rata-rata capaian yakni Ketersediaan dan Cadangan Pangan 49,50 %, Distribusi dan Akses Pangan 99,15 %, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 34,60 % dan Penanganan Kerawanan Pangan 100 %.
10. SPM Bidang Sosial realisasi pencapaian rata-rata yakni pada jenis pelayanan dasar Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebesar 58,16 %, Penyediaan sarana dan prasarana sosial 63,75 %, Penanggulangan korban Bencana 100 % sedangkan untuk Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial sebesar 21,98 %.
11. Sebagian dari SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, yang ditangani oleh Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan adalah Pelayanan Dasar Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi Lingkungan & Persampahan yaitu Pengelolaan Sampah dengan indikator Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
12. Beberapa permasalahan mendasar yang menjadi hambatan dalam penerapan SPM sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah adalah keterbatasan anggaran pada tiap-tiap organisasi perangkat daerah yang menangani urusan SPM tersebut. Oleh karena itu bantuan anggaran dari pemerintah sangat diharapkan dalam rangka penerapan SPM tersebut.
13. Penanganan SPM didaerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati, agar ada wewenang SKPD yang bertanggung jawab menerapkan SPM lebih jelas, dan SPM yang sudah ditetapkan oleh Pusat memiliki landasan operasional yang jelas untuk diterapkan di daerah.

Demikian laporan SPM ini kami buat, semoga target pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.